

**PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk
DAN ENTITAS ANAK**

**Laporan Keuangan Interim Konsolidasian
30 September 2011 (Tidak Diaudit) dan
31 Desember 2010 (Diaudit) dan
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 September 2011 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan untuk
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 September 2010 (Tidak Diaudit)
(Mata Uang Rupiah)**

**PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk
DAN ENTITAS ANAK
Laporan Keuangan Interim Konsolidasian
30 September 2011 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010 (Diaudit) dan
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2011 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan untuk
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010 (Tidak Diaudit)**

Daftar Isi

	<u>Halaman</u>
Laporan Keuangan Interim Konsolidasian	
Laporan Posisi Keuangan Interim Konsolidasian.....	1 - 2
Laporan Laba Rugi Komprehensif Interim Konsolidasian.....	3
Laporan Perubahan Ekuitas Interim Konsolidasian.....	4 - 5
Laporan Arus Kas Interim Konsolidasian.....	6
Catatan atas Laporan Keuangan Interim Konsolidasian.....	7 - 71

PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 September 2011 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010 (Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	30 September 2011 (Tidak Diaudit)	31 Desember 2010 (Diaudit)
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	2e,2y,4,30	39.618.849.932	95.113.356.789
Investasi jangka pendek	2y, 5	33.378.847.208	56.434.204.983
Piutang usaha dengan pihak ketiga - neto	2g,2y,3,6	4.696.830.511	2.880.788.386
Piutang lainnya			
Pihak ketiga	2g,2y	1.754.366.556	425.248.481
Pihak-pihak berelasi	2f,2y,7	994.817.816	957.466.816
Persediaan	2h,8	856.888.241	560.426.194
Pajak dibayar di muka	2s,19a	18.553.705.921	5.967.016.364
Uang muka dan biaya dibayar di muka	2i	9.458.133.111	2.078.504.144
JUMLAH ASET LANCAR		109.312.439.296	164.417.012.157
ASET TIDAK LANCAR			
Penyertaan saham	2j, 9	45.573.935.525	43.641.289.487
Aset pajak tangguhan	2s,19c	3.707.881.362	3.105.369.048
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 55.941.233.205 pada tanggal 30 September 2011 dan Rp 50.204.695.352 pada tanggal 31 Desember 2010	2k,2m,3,10	151.182.598.368	110.351.997.525
Hak atas sewa tanah jangka panjang	2n,11	49.126.768.072	47.713.968.471
Tanah yang belum dikembangkan	2o,12	12.615.413.798	12.614.910.798
Goodwill	2b,2c,2m,13	205.949.432.430	239.998.243.836
Biaya ditangguhkan	2k,14	22.155.532.112	21.035.147.145
Uang muka perolehan aset tetap	15	5.924.639.298	4.897.363.248
Aset takberwujud	2l	358.872.901	370.697.526
Jaminan	2y	2.455.487.225	109.079.032
Aset tidak lancar lainnya	2t,16	368.906.184.643	162.323.745.588
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		867.956.745.734	646.161.811.704
JUMLAH ASET		977.269.185.030	810.578.823.861

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Interim Konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan interim konsolidasian secara keseluruhan.

**PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk
DAN ENTITAS ANAK**
LAPORAN POSISI KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN (lanjutan)
30 September 2011 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010 (Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	30 September 2011 (Tidak Diaudit)	31 Desember 2010 (Diaudit)
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang usaha	2y,17	3.033.698.259	2.388.896.858
Utang lainnya			
Pihak ketiga	2y,18	64.096.653.077	31.309.526.314
Pihak-pihak berelasi	2f,2y,7	4.099.417.472	15.522.839.972
Utang pajak	2s,19b	2.466.974.724	2.149.722.196
Biaya masih harus dibayar	2y,20	3.556.501.520	6.665.375.391
Utang sewa pembiayaan jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	2k,2y	366.100.430	266.750.013
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK		77.619.345.482	58.303.110.744
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Sewa diterima di muka	21	44.436.573.082	18.283.299.349
Goodwill negatif	2b,13	-	112.613.338
Utang sewa pembiayaan jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	2k,2y	1.172.380.880	627.539.438
Liabilitas pajak tangguhan	2s,19c	159.392.576	-
Liabilitas imbalan kerja	2u,3,29	7.066.359.525	6.052.555.721
Pinjaman jangka panjang	2y,22,30	211.071.569.577	123.148.945.538
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG		263.906.275.640	148.224.953.384
JUMLAH LIABILITAS		341.525.621.122	206.528.064.128
EKUITAS			
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk			
Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham			
Modal dasar - 5.000.000.000 saham			
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 2.410.803.600 saham	1b,23	241.080.360.000	241.080.360.000
Selisih penilaian aset dan liabilitas	2x,33	144.715.511.834	144.715.511.834
Selisih nilai transaksi perubahan ekuitas entitas anak	13	112.233.268	-
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	2b	77.622.880.357	77.622.880.357
Saldo laba		30.309.909.785	28.318.674.893
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		493.840.895.244	491.737.427.084
Kepentingan Nonpengendali	2b	141.902.668.664	112.313.332.649
JUMLAH EKUITAS		635.743.563.908	604.050.759.733
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		977.269.185.030	810.578.823.861

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Interim Konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan interim konsolidasian secara keseluruhan.

**PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF INTERIM KONSOLIDASIAN
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2011 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan untuk
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	Catatan	30 SEPTEMBER 2011 (Tidak Diaudit) (Sembilan Bulan)	30 SEPTEMBER 2010 (Tidak Diaudit) (Sembilan Bulan)
PENDAPATAN USAHA	2q,24	52.319.455.430	11.826.045.528
BEBAN POKOK PENDAPATAN	2q,25	12.445.439.371	2.522.762.670
LABA BRUTO		39.874.016.059	9.303.282.858
BEBAN USAHA			
Beban penjualan	2q,26	(5.092.994.563)	(479.953.581)
Beban umum dan administrasi	2q,27	(17.316.714.848)	(3.255.200.253)
Beban usaha pemilik	2q,28	(10.648.281.501)	(6.940.919.774)
Beban penyusutan	10	(5.824.433.223)	(1.392.512.345)
Jasa manajemen dan lisensi	31	(3.593.179.126)	(491.866.154)
Pendapatan operasi lainnya	2r	2.557.211.132	4.842.787.943
Beban operasi lainnya		(1.286.311.840)	(143.391.677)
LABA USAHA		(1.330.687.910)	1.442.227.017
Bagian atas laba neto entitas asosiasi	2j,9	1.932.646.039	3.052.173.286
Pendapatan keuangan		1.593.742.558	125.875.724
Biaya keuangan		(2.248.677.435)	-
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN		(52.976.748)	4.620.276.027
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN			
Kini	2s,	(31.140.750)	-
Tanggungan	2s,	443.119.739	14.196.126
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan - Neto		411.978.989	14.196.126
LABA BERSIH		359.002.241	4.634.472.153
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN		-	-
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF		359.002.241	4.634.472.153
Laba yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk		1.991.234.892	5.789.161.296
Kepentingan nonpengendali		(1.632.232.651)	(1.154.689.143)
JUMLAH		359.002.241	4.634.472.153
LABA BERSIH PER SAHAM	2w	0,83	2,40

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Interim Konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan interim konsolidasian secara keseluruhan.

**PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS INTERIM KONSOLIDASIAN
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2011 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan untuk
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk								
Catatan	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Selisih Penilaian Aset dan Liabilitas	Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali	Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali Periode Komparatif	Saldo Laba	Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	Kepentingan Nonpengendali	Jumlah Ekuitas
Saldo 1 Januari 2010	159.400.000.000	144.715.511.834	-	159.303.240.357	4.414.998.408	467.833.750.599	19.326.631.844	487.160.382.443
Bagian rugi bersih TSW Januari - Mei 2010	-	-	843.133.707	(843.133.707)	-	-	-	-
Penambahan saham baru atas Penggabungan Usaha	1b 81.680.360.000	-	76.779.746.650	(158.460.106.650)	-	-	-	-
Laba untuk sembilan bulan yg berakhir pada tanggal 30 Sep 2010	-	-	-	-	5.789.161.296	5.789.161.296	(1.154.689.143))	4.634.472.153
Saldo 30 Sep 2010 (Tidak Diaudit)	241.080.360.000	144.715.511.834	77.622.880.357	-	10.204.159.704	473.622.911.895	18.171.942.701	491.794.854.596
Saldo 1 Januari 2010	159.400.000.000	144.715.511.834	-	159.303.240.357	4.414.998.408	467.833.750.599	19.326.631.844	487.160.382.443
Bagian rugi bersih TSW Januari - Mei 2010	-	-	843.133.707	(843.133.707)	-	-	-	-
Penambahan saham baru atas Penggabungan Usaha	1b 81.680.360.000	-	76.779.746.650	(158.460.106.650)	-	-	-	-
Kepentingan nonpengendali dari akuisisi entitas anak baru	-	-	-	-	-	-	90.784.840.735	90.784.840.735
Laba untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010	-	-	-	-	23.903.676.485	23.903.676.485	2.201.860.070	26.105.536.555
Saldo 31 Desember 2010 (Diaudit)	241.080.360.000	144.715.511.834	77.622.880.357	-	28.318.674.893	491.737.427.084	112.313.332.649	604.050.759.733

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Interim Konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan interim konsolidasian secara keseluruhan.

**PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk
DAN ENTITAS ANAK**
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS INTERIM KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2011 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan untuk
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk								
Catatan	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Selisih Penilaian Aset dan Liabilitas	Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali	Selisih Nilai Transaksi Perubahan Ekuitas Entitas Anak	Saldo Laba	Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	Kepentingan Nonpengendali	Jumlah Ekuitas
Saldo 1 Januari 2011	241.080.360.000	144.715.511.834	77.622.880.357	-	28.318.674.893	491.737.427.084	112.313.332.649	604.050.759.733
Selisih nilai transaksi perubahan ekuitas entitas anak	13	-	-	112.233.268	-	112.233.268	380.070	112.613.338
Kepentingan nonpengendali dari penjualan penyertaan saham	1d	-	-	-	-	-	19.951.188.596	19.951.188.596
Uang muka penyertaan saham	-	-	-	-	-	-	11,270,000,000	11,270,000,000
Laba untuk sembilan bulan yg berakhir pada tanggal 30 Sep 2011	-	-	-	-	1.991.234.892	1.991.234.892	(1.632.232.651)	359.002.241
Saldo 30 Sep 2011 (Tdk Diaudit)	241.080.360.000	144.715.511.834	77.622.880.357	112.233.268	30.309.909.785	493.840.895.244	141.902.668.664	635.743.563.908

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Interim Konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan interim konsolidasian secara keseluruhan.

**PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS INTERIM KONSOLIDASIAN
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2011 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan untuk
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	Catatan	2011 (Tidak Diaudit) (Sembilan Bulan)	2010 (Tidak Diaudit) (Sembilan Bulan)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan kas dari pelanggan		55.193.423.510	11.458.162.967
Sewa diterima di muka		-	-
Pembayaran kas kepada pemasok, karyawan dan lainnya		(33.884.633.734)	(7.049.705.803)
Kas diperoleh dari operasi		21.308.789.776	4.408.457.164
Penerimaan dari pendapatan bunga		1.712.130.138	35.803.424
Pembayaran pajak penghasilan		(11.697.398.912)	-
Pembayaran bunga		(1.473.038.778)	-
Penerimaan dari operasi lain-lain		2.454.085.213	-
Penerimaan hutang lain-lain		26.388.930.312	-
Pembayaran kepada pihak berelasi		(933.832.562)	-
Penambahan kepada pihak berelasi		(721.286.455)	-
Penerimaan dari pihak berelasi		23.536.401.796	-
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi		60.574.780.528	4.444.260.588
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Penjualan penyertaan saham	1d	54.000.000.000	-
Penjualan investasi jangka pendek		22.448.585.119	-
Penjualan aset tetap		455.700.000	-
Peningkatan aset tidak lancar lainnya		(237.881.997.957)	-
Perolehan aset tetap	10	(10.034.487.669)	(224.556.972)
Pembayaran biaya ditangguhkan		-	-
Uang muka perolehan aset tetap		(10.596.150.472)	-
Pembayaran hak sewa tanah jangka panjang		-	-
Pembayaran tanah belum dikembangkan		-	-
Peningkatan penyertaan saham		-	-
Penambahan obligasi konversi		(20.033.720.000)	-
Peningkatan aset lain-lain		(5.430.290.993)	79.359.212
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi		(207.072.361.972)	(145.197.760)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Penerimaan pinjaman jangka panjang		164.664.347.978	-
Pembayaran utang jangka panjang		(74.002.608.000)	-
Pembayaran utang sewa pembiayaan		341.334.609	(47.869.468)
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan		91.003.074.587	(47.869.468)
PENURUNAN NETO KAS DAN SETARA KAS		(55.494.506.857)	4.251.193.360
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE		95.113.356.789	622.174.077
KAS DAN SETARA KAS ANAK PERUSAHAAN YANG TIDAK DIKONSOLIDASI			3.984.153.822
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	4	39.618.849.932	8.857.521.259

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Interim Konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan interim konsolidasian secara keseluruhan.

**PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 September 2011 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010 (Diaudit) dan
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2011 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan untuk
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT Indonesian Paradise Property Tbk (Perusahaan) didirikan dengan nama PT Penta Karsa Lubrindo berdasarkan Akta No. 96 tanggal 14 Juni 1996 dan diubah dengan Akta No. 42 tanggal 8 Januari 1997, keduanya dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa, NG, SH, CN, pengganti dari Rachmat Santoso, SH, Notaris di Jakarta. Akta pendirian Perusahaan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-1030 HT.01.01.TH.97 tanggal 12 Februari 1997 dan telah didaftarkan dalam daftar Perusahaan di kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Utara No.413/BH.09.01/IX/97 tanggal 9 September 1997 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.21 tanggal 12 Maret 2002 Tambahan No. 2574. Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 75 tanggal 25 Mei 2010 dibuat di hadapan Robert Purba, SH, Notaris di Jakarta, mengenai perubahan modal ditempatkan dan disetor penuh sehubungan dengan penggabungan usaha Perusahaan dengan PT Tirta Saga Wangi dan Entitas Anak. Perubahan anggaran dasar ini telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.10-13057.Tahun 2010 tanggal 27 Mei 2010.

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan antara lain meliputi bidang perhotelan, pembangunan dan lain-lain.

Kantor pusat Perusahaan berkedudukan di Jalan Tebet Timur Raya No. 10C, Jakarta 12820. Perusahaan memiliki hotel dengan nama Hotel Harris yang memiliki 66 kamar dan beralamat di Jalan Dewi Sartika, Tuban, Bali. Surat tanda izin usaha hotel No. 556.2/649/Diparda tanggal 7 Oktober 2002 dari Kantor Pariwisata Pemerintah Kabupaten Badung, Bali berlaku sampai dengan tanggal 15 Januari 2013.

Perusahaan memulai kegiatan operasionalnya pada bulan Oktober 2002.

b. Penggabungan Usaha dengan PT Tirta Saga Wangi dan Entitas Anak

Berdasarkan Rancangan Penggabungan Usaha PT Indonesian Paradise Property (INPP) dan PT Tirta Saga Wangi (TSW), pada tanggal 5 April 2010 telah ditandatangani Kesepakatan Awal untuk mengintegrasikan kegiatan usaha kedua perusahaan tersebut dengan cara penggabungan usaha. Dalam penggabungan ini INPP bertindak selaku "Perusahaan Yang Menerima Penggabungan" dan TSW sebagai "Perusahaan Yang Akan Bergabung".

Sehubungan dengan telah diterimanya Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-13057.Tahun 2010 tanggal 27 Mei 2010, penggabungan usaha menjadi efektif pada tanggal 1 Juni 2010. Penggabungan usaha ini dinyatakan efektif oleh Bapepam-LK melalui surat No. S-4500/BL/2010 tanggal 20 Mei 2010.

Tanggal efektif penggabungan usaha dengan TSW ditetapkan pada tanggal 1 Juni 2010 berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 25 Mei 2010, yang dinyatakan dalam Akta Notaris Robert Purba, SH No. 75 tanggal yang sama. Selain menetapkan tanggal penggabungan usaha, akta ini juga menyetujui perubahan anggaran dasar INPP mengenai perubahan modal ditempatkan dan disetor penuh sehubungan dengan penggabungan usaha dari semula Rp 159.400.000.000 (terdiri dari 1.594.000.000 saham) menjadi Rp 241.080.360.000 (terdiri dari 2.410.803.600 saham).

**PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 September 2011 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010 (Diaudit) dan
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2011 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan untuk
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

b. Penggabungan Usaha dengan PT Tirta Saga Wangi dan Entitas Anak (lanjutan)

Sejak tanggal penggabungan usaha, seluruh hubungan hukum antara eks pelanggan/relasi bisnis dengan eks TSW telah beralih dan diteruskan oleh INPP.

Susunan pemegang saham sebelum dan pada tanggal penggabungan usaha adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Pemegang saham INPP sebelum penggabungan usaha		Pemegang saham TSW sebelum penggabungan usaha		Jumlah saham setelah konversi	Pemegang Saham INPP pada tanggal penggabungan usaha	
	Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh	%	Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh	%		Jumlah saham	%
Anemone Continental S.A. BVI	949.000.000	59,54%	-	-	-	949.000.000	39,36%
CB London S/A BSI SA	223.000.000	13,99%	-	-	-	223.000.000	9,25%
PT Grahatama Kreasibaru	129.861.000	8,15%	173.785.500	99,99%	816.791.850	946.652.850	39,27%
Yayasan Bunga Kasih	50.000.000	3,14%	2.500	0,01%	11.750	50.011.750	2,07%
Agoes Soelistyo Santoso (Presiden Direktur)	10.000.000	0,63%	-	-	-	10.000.000	0,41%
Patrick Santosa Rendradjaja (Direktur)	5.000.000	0,31%	-	-	-	5.000.000	0,21%
Diana Solaiman (Direktur)	3.500.000	0,22%	-	-	-	3.500.000	0,15%
Karel Patipeilohy (Komisaris)	1.000.000	0,06%	-	-	-	1.000.000	0,04%
Lain-lain	222.639.000	13,96%	-	-	-	222.639.000	9,24%
Jumlah	1.594.000.000	100%	173.788.000	100%	816.803.600	2.410.803.600	100%

Berdasarkan laporan penilaian No. Y&R/BV/10/046 tanggal 12 Mei 2010 dan No. Y&R/BV/10/029.2R tanggal 3 Mei 2010 dari KJPP Yanuar Bey & Rekan, penilai independen, untuk keperluan konversi saham, manajemen menetapkan nilai pasar wajar per saham IPP dan TSW masing-masing adalah sebesar Rp 159 (nilai penuh) dan Rp 745 (nilai penuh) per saham.

Berdasarkan penilaian tersebut, maka setiap 1 pemegang saham TSW akan mendapatkan 4,7 saham yang diterbitkan oleh INPP dengan nilai nominal Rp 100 (nilai penuh) per saham. Penilaian tersebut merupakan nilai intrinsik wajar dari masing-masing perusahaan dan juga memberikan premium di atas harga perdagangan historis.

Untuk perhitungan penambahan nilai modal saham INPP, manajemen menggunakan harga pasar saham INPP pada saat penggabungan usaha terjadi. Dengan demikian terdapat penambahan nilai modal saham sebesar Rp 81.680.360.000.

Pada tanggal efektif penggabungan usaha, INPP dan TSW berada dalam pengendalian entitas yang sama, yaitu PT Grahatama Kreasibaru (GK). Oleh karena itu, penggabungan usaha dilakukan dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan. Berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, selisih antara nilai pengalihan dengan nilai buku pada transaksi restrukturisasi antar entitas sepengendali dibukukan sebagai "Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali" pada unsur Ekuitas.

**PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 September 2011 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010 (Diaudit) dan
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2011 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan untuk
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Pencatatan sebagai Perusahaan Publik dan Penambahan Modal Saham

Pada tanggal 21 September 2004, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) berdasarkan Surat No. S-2970/PM/2004 dalam rangka pendaftaran sebagai Perusahaan Publik. Selanjutnya saham-saham Perusahaan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (dahulu Bursa Efek Surabaya) pada tanggal 1 Desember 2004.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan pada tanggal 26 Mei 2005, para pemegang saham Perusahaan menyetujui untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No. IX.D.4) sejumlah 75.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham yang diambil bagian oleh Premiere Estates Limited. Penambahan saham tersebut telah disetujui oleh Direksi Bursa Efek Surabaya melalui surat No. JKT-027/LIST-EMITEN/BES/VII/2006 tanggal 13 Juli 2005.

d. Entitas Anak yang Dikonsolidasikan

Perusahaan mempunyai bagian kepemilikan, baik langsung maupun tidak langsung, sama dengan atau lebih dari 50% saham Entitas Anak sebagai berikut:

Entitas Anak	Domisili	Kegiatan Usaha Utama	Tahun Operasi Komersial	Persentase Kepemilikan		Jumlah Aset (Sebelum Eliminasi)	
				30 September 2011	31 Desember 2010	30 September 2011	31 Desember 2010
<u>Pemilikan langsung:</u>							
PT Karsa Citra Unggul dan Entitas Anak (KCU)*	Jakarta	Hotel	-	99,98%	99,98%	44.812.669.849	29.035.585.251
PT Retzan Indonusa (RIN)*	Batam	Hotel	-	99,90%	99,99%	84.602.200.829	33.501.533.036
PT Mega Biru Selaras dan Entitas Anak (MBS)*	Jakarta	Properti dan hotel	-	99,66%	99,66%	48.023.409.639	40.360.078.206
PT Langgeng Cipta Karya (LCK)*	Jakarta	Hotel	2008	70,00%	70,00%	9.829.858.306	10.038.238.881
PT Dinamika Putra Perkasa dan Entitas Anak (DPP)*	Jakarta	Perdagangan Umum	-	60,00%	60,00%	46.390.279.275	23.481.281.315
PT Indonesian Paradise Island (IPI)**	Jakarta	Hotel	2004	55,00%	65,00%	357.797.490.964	256.306.761.772
PT Saranausaha Jaya (SJ)*	Jakarta	Perbelanjaan	-	55,00%	55,00%	4.591.815.363	5.118.150.210
PT Aneka Bina Laras dan Entitas anak (ABL)*	Jakarta	Hotel	2011	51,00%	51,00%	73.732.683.187	61.238.439.797
PT Eka Ilalang Suryadinamika (EIS)*	Jakarta	Hotel	-	51,00%	51,00%	27.573.543.389	27.462.523.716
<u>Pemilikan tidak langsung:</u>							
Melalui KCU:							
PT Segara Biru Kencana (SBK)*	Jakarta	Hotel	-	99,99%	99,99%	1.316.460.346	92.252.908
PT Kega Property Utama (KPU)*	Jakarta	Hotel	-	92,73%	92,73%	25.203.431.962	11.003.941.422
Melalui MBS:							
PT Grahatama Indah Lestari (GIL)*	Jakarta	Hotel	-	99,99%	99,99%	12.981.981.051	11.696.858.648
PT Cakra Guna Dharma Eka (CGDE)*	Jakarta	Properti dan Hotel	-	88,65%	88,65%	7.096.648.285	6.720.648.841

**PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 September 2011 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010 (Diaudit) dan
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2011 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan untuk
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)
d. Entitas Anak yang Dikonsolidasikan (lanjutan)

Entitas Anak	Domisili	Kegiatan Usaha Utama	Tahun Operasi Komersial	Persentase Kepemilikan		Jumlah Aset (Sebelum Eliminasi)	
				30 Sep 2011	31 Desember 2010	30 Sep 2011	31 Desember 2010
Pemilikan tidak langsung: (lanjutan)							
Melalui ABL:							
PT Padma Suasa (PS)*	Jakarta	Hotel	2011	99,99%	99,99%	5.944.811.831	99.455.000
Melalui DPP:							
PT Magna Terra (MT)*	Jakarta	Pusat perbelanjaan	-	30,60%	30,60%	45.145.681.995	22.884.347.353

* Entitas Anak dari Perusahaan yang Menggabungkan Diri (TSW)

** Laporan keuangan dikonsolidasikan sejak 23 Desember 2010, sebelumnya disajikan dengan metode ekuitas

MBS, KCU, DPP, RIN, EIS, LCK, SJ dan ABL

Pada tanggal 1 Juni 2010, PT Tirta Saga Wangi (TSW), pemegang saham mayoritas MBS, KCU, DPP, RIN, EIS, LCK, SJ dan ABL, telah efektif melakukan penggabungan usaha dengan Perusahaan sebagaimana dijelaskan pada Catatan 1b. Sehingga sejak tanggal tersebut, MBS, KCU, DPP, RIN, EIS, LCK, SJ dan ABL adalah Entitas Anak dari Perusahaan. Jumlah aset dan liabilitas Entitas Anak tersebut pada saat penggabungan usaha adalah sebagai berikut:

1 Juni 2010

Aset lancar	73.459.160.384
Aset tidak lancar	116.904.157.605
Jumlah liabilitas	7.943.014.968

IPI

Pada tanggal 23 Desember 2010, Perusahaan meningkatkan kepemilikannya pada IPI sebesar 16,25% menjadi 65% melalui pembelian saham dari Dana Pensiun Bank Indonesia dengan biaya perolehan Rp 87.750.000.000 (Catatan 9). Pembelian saham ini telah dinyatakan dalam Akta Jual Beli Saham No. 243 tanggal 23 Desember 2010 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta. Pada tanggal akuisisi, terdapat perbedaan antara aset bersih Perusahaan diakuisisi dan biaya perolehan sebesar Rp 55.329.318.535 yang dicatat sebagai *goodwill*.

Pada tanggal 23 Desember 2010, Perusahaan menandatangani perjanjian pengikatan jual beli saham dengan PT Bimantara Citra (Bimantara) untuk penjualan 10% kepemilikan saham IPI milik Perusahaan kepada Bimantara sebanyak 24.466.667 saham dengan harga Rp 54 miliar. Penyelesaian penjualan dan pembelian saham tersebut dapat dilakukan setelah dipenuhinya 3 (tiga) persyaratan sebagai berikut:

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari IPI telah menyetujui pengalihan saham tersebut.
- Perusahaan telah memperoleh persetujuan yang diperlukan untuk melakukan pengalihan dan penjualan saham kepada Bimantara sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.
- Bimantara telah memperoleh persetujuan yang diperlukan untuk melakukan pembelian saham dari Perusahaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bimantara.

**PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 September 2011 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010 (Diaudit) dan
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2011 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan untuk
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas Anak yang Dikonsolidasikan (lanjutan)

IPI (lanjutan)

Sehubungan telah dipenuhinya ketiga persyaratan tersebut di atas, pada tanggal 13 Juni 2011 selanjutnya penjualan saham dinyatakan dalam Akta Jual Beli Saham No. 001 tanggal 13 Juni 2011 yang dibuat di hadapan Eria Heryanti Poerwandini, SH, Notaris di Jakarta, Perusahaan menyetujui untuk menjual dan menyerahkan saham yang dimilikinya kepada Bimantara dengan harga jual sebesar Rp 54 miliar.

e. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 75 tanggal 25 Mei 2010 yang dibuat oleh Robert Purba, SH, Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 30 September 2011 dan 2010 dan 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Todo Sihombing
Wakil Presiden Komisaris : Amelia Gozali
Komisaris : Karel Patipeilohy

Direksi:

Presiden Direktur : Agoes Soelistyo Santoso
Direktur Independen : Edhie Bambang Siswoko
Direktur : Patrick Santosa Rendradjaja
Direktur : Diana Solaiman

Susunan Komite Audit Perusahaan pada tanggal 30 September 2011 dan 2010 dan 31 Desember 2010 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 73 tanggal 25 Mei 2010 yang dibuat oleh Robert Purba, SH, Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

Ketua : Todo Sihombing
Anggota : Bambang Rahardja Burhan
Anggota : Eka Shanti T

Corporate Secretary Perusahaan pada tanggal 30 September 2011 dan 2010 dan 31 Desember 2010 berdasarkan surat penunjukkan dari Direksi Perusahaan pada tanggal 21 Juli 2004 adalah Ninawati.

Gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi sejumlah Rp 153.000.000, Rp 136.800.000 dan Rp 289.400.000 masing-masing untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2011 dan 2010 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

Perusahaan memiliki masing-masing sejumlah 84 karyawan pada tanggal 30 September 2011 dan 2010 dan 86 karyawan pada tanggal 31 Desember 2010 (tidak diaudit).

**PT INDOONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 September 2011 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010 (Diaudit) dan
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2011 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan untuk
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Interim Konsolidasian

Laporan keuangan interim konsolidasian disusun berdasarkan praktek dan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), serta peraturan-peraturan dan Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh BAPEPAM-LK. Seperti diungkapkan dalam catatan-catatan terkait di bawah ini, beberapa standar akuntansi yang telah direvisi dan diterbitkan, diterapkan efektif tanggal 1 Januari 2011.

Laporan keuangan interim konsolidasian disusun sesuai dengan PSAK 1 (Revisi 2009), "Penyajian Laporan Keuangan" dan PSAK 3 (Revisi 2010), "Laporan Keuangan Interim" (keduanya diterapkan pada tanggal 1 Januari 2011).

PSAK 1 (Revisi 2009) mengatur penyajian laporan keuangan, yaitu antara lain, tujuan pelaporan, komponen laporan keuangan, penyajian secara wajar, materialitas dan agregasi, saling hapus, perbedaan antara aset lancar dan tidak lancar dan liabilitas jangka pendek dan jangka panjang, informasi komparatif, konsistensi penyajian dan memperkenalkan pengungkapan baru, antara lain, sumber ketidakpastian dan pertimbangan, pengelolaan permodalan, pendapatan komprehensif lain, penyimpangan dari standar akuntansi keuangan, dan pernyataan kepatuhan.

Sedangkan PSAK 3 (Revisi 2010) mengatur penyajian minimum laporan keuangan interim, serta prinsip pengakuan dan pengukuran dalam laporan keuangan lengkap atau ringkas untuk periode interim.

Penerapan PSAK 1 (Revisi 2009) dan PSAK 3 (Revisi 2010) tersebut memberikan pengaruh yang signifikan bagi penyajian dan pengungkapan terkait dalam laporan keuangan interim konsolidasian.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan interim konsolidasian adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, kecuali bagi penerapan beberapa SAK yang telah direvisi efektif sejak tanggal 1 Januari 2011 seperti yang telah diungkapkan pada catatan ini.

Laporan keuangan interim konsolidasian disusun berdasarkan konsep akrual kecuali untuk laporan arus kas interim konsolidasian, dan menggunakan konsep nilai wajar untuk Perusahaan efektif tanggal 31 Juli 2009 sebagai akibat dari penerapan kuasi reorganisasi sedangkan untuk Entitas Anak menggunakan biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang diukur dengan menggunakan dasar seperti yang dijelaskan dalam catatan yang relevan.

Laporan arus kas interim konsolidasian menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan dengan menggunakan metode langsung.

**PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 September 2011 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010 (Diaudit) dan
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2011 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan untuk
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Interim Konsolidasian (lanjutan)

Efektif tanggal 1 Januari 2011, Perusahaan telah menerapkan PSAK 2 (Revisi 2009), "Laporan Arus Kas", yang menggantikan PSAK 2 dengan judul yang sama. Pelaksanaan PSAK 2 (Revisi 2009) tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan interim konsolidasian.

Mata uang pelaporan yang digunakan pada laporan keuangan interim konsolidasian adalah Rupiah.

b. Prinsip-prinsip Konsolidasi

Sejak 1 Januari 2011

Efektif 1 Januari 2011, Perusahaan dan Entitas Anak menerapkan PSAK 4 (Revisi 2009), "Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri", serta menerapkan beberapa hal berikut secara prospektif: (i) rugi entitas anak yang menyebabkan saldo defisit bagi kepentingan nonpengendali ("KNP"); (ii) kehilangan pengendalian pada entitas anak; (iii) perubahan kepemilikan pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian; (iv) hak suara potensial dalam menilai keberadaan pengendalian; dan (v) konsolidasian atas entitas anak yang memiliki pembatasan jangka panjang.

PSAK 4 (Revisi 2009) mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian untuk sekelompok entitas yang berada dalam pengendalian suatu entitas induk, dan akuntansi untuk investasi pada entitas-entitas anak, pengendalian bersama entitas, dan entitas asosiasi ketika laporan keuangan tersendiri disajikan sebagai informasi tambahan.

Seperti diuraikan pada bagian ini, penerapan PSAK 4 (Revisi 2009) tersebut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pelaporan keuangan, termasuk pengungkapan terkait, dalam laporan keuangan interim konsolidasian.

Laporan keuangan interim konsolidasian meliputi laporan keuangan entitas anak (KCU, RIN, MBS, LCK, IPI, DPP, SJ, ABL, EIS, SBK, KPU, GIL, CGDE, PS dan MT) dimana Perusahaan, baik secara langsung atau tidak langsung, memiliki lebih dari 50% kepemilikan saham.

Semua akun dan transaksi antar Perusahaan yang material, termasuk keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi, jika ada, dieliminasi untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil operasi Perusahaan dan Entitas Anak sebagai satu kesatuan usaha.

Entitas-entitas anak dikonsolidasi secara penuh sejak tanggal akuisisi, yaitu tanggal Perusahaan memperoleh pengendalian, sampai dengan tanggal entitas induk kehilangan pengendalian. Pengendalian dianggap ada ketika Perusahaan memiliki secara langsung atau tidak langsung melalui entitas-entitas anak, lebih dari setengah kekuasaan suara entitas.

Rugi entitas anak yang tidak dimiliki secara penuh diatribusikan pada KNP bahkan jika hal ini mengakibatkan KNP mempunyai saldo defisit.

**PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 September 2011 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010 (Diaudit) dan
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2011 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan untuk
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

b. Prinsip-prinsip Konsolidasi (lanjutan)

Sejak 1 Januari 2011 (lanjutan)

Jika kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Perusahaan dan Entitas Anak:

- menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak;
- menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap KNP;
- menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran, yang dicatat di ekuitas, bila ada;
- mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima;
- mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya;
- mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi; dan
- mereklasifikasi bagian induk atas komponen yang sebelumnya diakui sebagai pendapatan komprehensif ke laporan laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba.

KNP mencerminkan bagian atas laba atau rugi dan aset neto dari entitas-entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung maupun tidak langsung oleh Perusahaan, yang masing-masing disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif interim konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan interim konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

Sebelum 1 Januari 2011

Proporsi bagian pemilikan pemegang saham minoritas atas aset bersih dan laba atau rugi bersih entitas anak konsolidasian sebelumnya disajikan sebagai "Hak Minoritas atas Aset Neto Entitas Anak" pada laporan posisi keuangan interim konsolidasian dan sebagai "Hak Minoritas atas Laba (Rugi) Neto Entitas Anak" pada laporan laba rugi komprehensif interim konsolidasian.

Kerugian yang menjadi bagian pemegang saham minoritas pada suatu Entitas Anak dapat melebihi bagiannya dalam modal disetor. Kelebihan tersebut dan kerugian lebih lanjut yang menjadi bagian pemegang saham minoritas, dibebankan pada Perusahaan sebagai pemegang saham mayoritas, kecuali apabila pemegang saham minoritas memiliki kepentingan jangka panjang lainnya pada Entitas Anak tersebut atau terdapat kewajiban yang mengikat untuk menutupi kerugian tersebut dan pemegang saham minoritas mampu memenuhi kewajibannya. Apabila pada tahun selanjutnya Entitas Anak melaporkan laba, maka laba tersebut terlebih dahulu dialokasikan kepada Perusahaan sebagai pemegang saham mayoritas sampai seluruh bagian kerugian pemegang saham minoritas yang di bebankan pada Perusahaan dapat dipulihkan.

Pada saat akuisisi dan menerapkan kuasi reorganisasi, aset dan liabilitas Entitas Anak diukur sebesar nilai wajarnya pada tanggal akuisisi dan tanggal kuasi reorganisasi. Selisih dari nilai wajar kepemilikan Perusahaan atas aset bersih Entitas Anak dengan nilai perolehannya apabila memenuhi syarat dicatat sebagai *goodwill* dan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama periode 5 tahun. Apabila biaya akuisisi lebih rendah dibandingkan nilai wajar aset neto Entitas yang diakuisisi pada tanggal transaksi, maka nilai wajar aset non-moneter yang diakuisisi harus diturunkan secara proporsional, sampai seluruh selisih tersebut dieliminasi. Sisa selisihnya akan dicatat sebagai *goodwill negatif* dan diamortisasi menggunakan metode garis lurus selama 20 tahun.

PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 September 2011 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010 (Diaudit) dan
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2011 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan untuk
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

c. Kombinasi Bisnis

Sejak 1 Januari 2011

Efektif tanggal 1 Januari 2011, Perusahaan dan Entitas Anak menerapkan secara prospektif PSAK 22 (Revisi 2010), "Kombinasi Bisnis" yang berlaku bagi kombinasi bisnis yang terjadi pada atau setelah awal tahun/periode buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011.

PSAK 22 (Revisi 2010) menjelaskan transaksi atau peristiwa lain yang memenuhi definisi kombinasi bisnis guna meningkatkan relevansi, keandalan, dan daya banding informasi yang disampaikan entitas pelapor dalam laporan keuangannya tentang kombinasi bisnis dan dampaknya.

Seperti diuraikan pada bagian ini, penerapan PSAK 22 (Revisi 2010) tersebut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pelaporan keuangan berikut pengungkapan terkait dalam laporan keuangan interim konsolidasian.

Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Biaya perolehan dari sebuah akuisisi diukur pada nilai agregat imbalan yang dialihkan, diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan jumlah setiap KNP pada pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, pihak pengakuisisi mengukur KNP pada entitas yang diakuisisi baik pada nilai wajar ataupun pada proporsi kepemilikan KNP atas aset neto yang teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Biaya-biaya akuisisi yang timbul dibebankan langsung dan disertakan dalam beban-beban administrasi.

Ketika melakukan akuisisi atas sebuah bisnis, Perusahaan dan Entitas Anak mengklasifikasikan dan menentukan aset keuangan yang diperoleh dan liabilitas keuangan yang diambil alih berdasarkan pada persyaratan kontraktual, kondisi ekonomi dan kondisi terkait lain yang ada pada tanggal akuisisi. Hal ini termasuk pengelompokan derivatif melekat dalam kontrak utama oleh pihak yang diakuisisi.

Dalam suatu kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, pihak pengakuisisi mengukur kembali kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada pihak yang diakuisisi pada nilai wajar tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan melalui laba atau rugi.

Imbalan kontinjensi yang dialihkan oleh pihak pengakuisisi diakui pada nilai wajar tanggal akuisisi. Perubahan nilai wajar atas imbalan kontinjensi setelah tanggal akuisisi yang diklasifikasikan sebagai aset atau liabilitas, akan diakui dalam laporan laba rugi atau pendapatan komprehensif lain sesuai dengan PSAK 55 (Revisi 2006). Jika diklasifikasikan sebagai ekuitas, imbalan kontinjensi tidak diukur kembali dan penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas.

Pada tanggal akuisisi, *goodwill* awalnya diukur pada harga perolehan yang merupakan selisih lebih nilai agregat dari imbalan yang dialihkan dan jumlah setiap KNP atas selisih jumlah dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Jika imbalan tersebut kurang dari nilai wajar aset neto entitas anak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui sebagai laba atau rugi.

Setelah pengakuan awal, *goodwill* diukur pada jumlah tercatat dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Untuk tujuan uji penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis atau kuasi reorganisasi, sejak tanggal tertentu dialokasikan kepada setiap Unit Penghasil Kas ("UPK") dari Perusahaan dan Entitas Anak yang diharapkan akan bermanfaat dari sinergi kombinasi tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi ditetapkan atas UPK tersebut.

**PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 September 2011 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010 (Diaudit) dan
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2011 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan untuk
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

c. Kombinasi Bisnis (lanjutan)

Sejak 1 Januari 2011 (lanjutan)

Jika *goodwill* telah dialokasikan pada suatu UPK dan operasi tertentu atas UPK tersebut dihentikan, maka *goodwill* yang diasosiasikan dengan operasi yang dihentikan tersebut termasuk dalam jumlah tercatat operasi tersebut ketika menentukan keuntungan atau kerugian dari penjualan operasi. *Goodwill* yang dilepaskan tersebut diukur berdasarkan nilai relatif operasi yang dihentikan dan porsi UPK yang ditahan.

Sebelum 1 Januari 2011

Sebagai perbandingan dengan persyaratan-persyaratan tersebut diatas, kebijakan akuntansi atas kombinasi bisnis sebelum tanggal 1 Januari 2011 adalah sebagai berikut:

- i. kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode pembelian. Biaya-biaya transaksi yang secara langsung dapat diatribusikan pada akuisisi merupakan bagian dari harga perolehan akuisisi. KNP (sebelumnya dikenal sebagai hak minoritas) diukur berdasarkan proporsi atas nilai tercatat aset neto teridentifikasi;
- ii. kombinasi bisnis yang diperoleh secara bertahap diakui sebagai tahap-tahap yang terpisah. Tambahan kepemilikan saham tidak mempengaruhi *goodwill* yang telah diakui sebelumnya;
- iii. ketika Perusahaan dan Entitas Anak mengakuisisi sebuah bisnis, derivatif melekat yang dipisahkan dari kontrak utama oleh pihak yang diakuisisi tidak diukur kembali pada saat akuisisi, kecuali kombinasi bisnis menyebabkan perubahan syarat-syarat kontrak yang secara signifikan merubah arus kas yang semula disyaratkan dalam kontrak;
- iv. imbalan kontinjensi diakui jika, dan hanya jika, Perusahaan dan Entitas Anak mempunyai kewajiban saat ini, yaitu kemungkinan besar atas arus ekonomis keluar, yang dapat secara memadai diestimasi. Penyesuaian setelah tanggal akuisisi terhadap imbalan kontinjensi diakui sebagai bagian dari *goodwill*.

d. Restrukturisasi Entitas Sepengendali

Akuisisi atau pengalihan saham antara entitas sepengendali, dicatat sesuai dengan PSAK 38 (Revisi 2004), "Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali". Dalam PSAK 38 (Revisi 2004), pengalihan aset, kewajiban, saham, dan instrumen kepemilikan lainnya dari entitas sepengendali tidak akan menghasilkan laba atau rugi bagi perusahaan atau entitas individual dalam kelompok yang sama.

Karena transaksi restrukturisasi entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi pemilikan atas aset, kewajiban, saham atau instrumen kepemilikan lainnya yang dipertukarkan, aset atau kewajiban yang dialihkan dicatat pada nilai buku sebagai kombinasi bisnis dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan (*pooling-of-interests*).

Dalam menerapkan metode penyatuan kepemilikan, komponen laporan keuangan untuk periode dimana terjadi restrukturisasi dan untuk periode lain yang disajikan untuk tujuan perbandingan, disajikan sedemikian rupa seolah-olah restrukturisasi telah terjadi sejak awal periode laporan keuangan yang disajikan. Selisih antara nilai tercatat investasi pada tanggal efektif dan harga pengalihan diakui dalam akun "Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali".

**PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 September 2011 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010 (Diaudit) dan
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2011 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan untuk
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

e. Setara Kas

Deposito berjangka dengan jangka waktu tiga bulan atau kurang pada saat penempatan dan tidak digunakan sebagai jaminan atas liabilitas dan pinjaman lainnya diklasifikasikan sebagai "Setara Kas".

f. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Efektif 1 Januari 2011, Perusahaan dan Entitas Anak menerapkan PSAK 7 (Revisi 2010), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". PSAK revisi ini mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen, dalam laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan tersendiri entitas induk, dan juga diterapkan terhadap laporan keuangan secara individual. Penerapan PSAK yang direvisi tersebut tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan terkait dalam laporan keuangan interim konsolidasian.

Suatu pihak dianggap berelasi dengan Perusahaan dan Entitas Anak jika:

- a. langsung, atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, suatu pihak (i) mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan Perusahaan dan Entitas Anak; (ii) memiliki kepentingan dalam Perusahaan dan Entitas Anak yang memberikan pengaruh signifikan atas Perusahaan dan Entitas Anak; atau (iii) memiliki pengendalian bersama atas Perusahaan dan Entitas Anak;
- b. suatu pihak adalah entitas asosiasi Perusahaan dan Entitas Anak;
- c. suatu pihak adalah ventura bersama di mana Perusahaan dan Entitas Anak sebagai venturer;
- d. suatu pihak adalah anggota dari personil manajemen kunci Perusahaan dan Entitas Anak atau induk;
- e. suatu pihak adalah anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan dalam butir (a) atau (d);
- f. suatu pihak adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi signifikan oleh atau di mana hak suara signifikan dimiliki oleh, langsung maupun tidak langsung, individu seperti diuraikan dalam butir (d) atau (e); atau
- g. suatu pihak adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari Perusahaan dan Entitas yang terkait dengan Perusahaan dan Entitas Anak.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan interim konsolidasian.

g. Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai

Sebelum 1 Januari 2010, penyisihan kerugian penurunan nilai ditetapkan berdasarkan hasil penelaahan terhadap kemungkinan tertagihnya masing-masing piutang pada akhir periode/tahun. Efektif 1 Januari 2010, Perusahaan dan Entitas Anak melakukan penyisihan kerugian penurunan nilai sesuai dengan PSAK 55 (Revisi 2006).

h. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai terendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto.

**PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 September 2011 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010 (Diaudit) dan
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2011 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan untuk
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

h. Persediaan (lanjutan)

Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang yang terdiri dari semua biaya pembelian, biaya konversi dan biaya lainnya yang terjadi pada saat membawa persediaan ke lokasi dan kondisi yang sekarang. Penyisihan untuk persediaan usang dan/atau penurunan nilai persediaan ditetapkan untuk menurunkan nilai tercatat persediaan ke nilai realisasi neto.

Nilai realisasi neto adalah taksiran harga jual dalam kegiatan usaha normal, dikurangi dengan estimasi biaya penyelesaian dan perkiraan biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

i. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi dan dibebankan pada operasi selama masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

j. Penyertaan Saham

Penyertaan saham pada entitas dimana Perusahaan dan Entitas Anak tidak memiliki pengaruh yang signifikan dicatat sesuai dengan PSAK 55 (Revisi 2006).

Perusahaan dan Entitas Anak menerapkan PSAK 15 (Revisi 2009), "Investasi pada Entitas Asosiasi". PSAK revisi ini diterapkan secara retrospektif dan mengatur akuntansi investasi dalam entitas asosiasi dalam hal penentuan pengaruh signifikan, metode akuntansi yang harus diterapkan, penurunan nilai investasi dan laporan keuangan tersendiri. Penerapan PSAK yang direvisi tersebut tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap laporan keuangan interim konsolidasian.

Investasi Perusahaan dan Entitas Anak pada entitas asosiasi diukur dengan menggunakan metode ekuitas. Entitas asosiasi adalah suatu entitas di mana Perusahaan dan Entitas Anak mempunyai pengaruh signifikan. Sesuai dengan metode ekuitas, nilai tercatat investasi ditambah atau dikurang dengan bagian Perusahaan dan Entitas Anak atas laba atau rugi bersih, dan penerimaan dividen dari *investee* sejak tanggal perolehan.

Pada tanggal 31 Juli 2009, investasi Perusahaan pada Entitas Asosiasi (dahulu PT Indonesian Paradise Island dan PT Java Paradise Island) telah disajikan berdasarkan nilai wajar sehubungan dengan kuasi reorganisasi yang dilakukan Perusahaan dan surplus revaluasi dibukukan sebagai selisih penilaian kembali investasi pada Entitas Asosiasi untuk mengeliminasi defisit.

Laporan laba rugi komprehensif interim konsolidasian mencerminkan bagian atas hasil operasi dari entitas asosiasi. Bila terdapat perubahan yang diakui langsung pada ekuitas dari entitas asosiasi, Perusahaan mengakui bagiannya atas perubahan tersebut dan mengungkapkan hal ini, jika ada, dalam laporan perubahan ekuitas konsolidasian. Laba atau rugi yang belum direalisasi sebagai hasil dari transaksi-transaksi antara Perusahaan dan Entitas Anak dengan entitas asosiasi dieliminasi pada jumlah sesuai dengan kepentingan Perusahaan dan Entitas Anak dalam entitas asosiasi.

Perusahaan dan Entitas Anak menentukan apakah diperlukan untuk mengakui tambahan rugi penurunan nilai atas investasi Perusahaan dan Entitas Anak dalam entitas asosiasi. Perusahaan dan Entitas Anak menentukan pada setiap tanggal pelaporan apakah terdapat bukti yang obyektif yang mengindikasikan bahwa investasi dalam entitas asosiasi mengalami penurunan nilai. Dalam hal ini, Perusahaan dan Entitas Anak menghitung jumlah penurunan nilai berdasarkan selisih antara jumlah terpulihkan atas investasi dalam entitas asosiasi dan nilai tercatatnya dan mengakuinya dalam laporan laba rugi komprehensif interim konsolidasian.

**PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 September 2011 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010 (Diaudit) dan
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2011 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan untuk
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

j. Penyertaan Saham (lanjutan)

Investasi dimana Perusahaan dan Entitas Anak memiliki kepemilikan paling sedikit 20% tetapi tidak lebih dari 50% dicatat dengan metode ekuitas.

k. Aset Tetap

Pemilikan Langsung

Pada tanggal 31 Juli 2009, aset tetap Perusahaan telah dinilai kembali sehubungan dengan kuasi reorganisasi yang dilakukan dan surplus revaluasi aset tetap dibukukan sebagai surplus revaluasi aset tetap untuk mengeliminasi saldo defisit.

Aset tetap Perusahaan dan Entitas Anak, kecuali tanah, dinyatakan sebesar model revaluasi (Perusahaan) dan biaya perolehan (Entitas Anak) setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai, jika ada. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus untuk Perusahaan dan Entitas Anak kecuali Entitas Anak tertentu (IPI) menggunakan metode saldo menurun ganda berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

		Tahun
Bangunan dan prasarana		20
Peralatan dan perlengkapan		4 - 8
Kendaraan	8	

Sejak tanggal 31 Juli 2009, tanah dinyatakan sebesar model revaluasi (Perusahaan) dan biaya perolehan (Entitas Anak) dan tidak diamortisasi serta dikurangi rugi penurunan nilai, jika ada. Biaya tertentu sehubungan dengan perolehan atau perpanjangan hak atas tanah dapat ditangguhkan dan diamortisasi selama jangka hukum hak atas tanah atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

Pada setiap akhir tahun, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan di reviu dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif.

Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada operasi pada saat terjadinya; pembaruan dan perbaikan yang signifikan akan dikapitalisasi ke dalam nilai aset. Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual, biaya perolehan serta akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari akun aset tetap dan laba atau rugi yang terjadi dibebankan pada periode/tahun berjalan.

Semua biaya insidental yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan hak atas tanah, seperti; biaya hukum, daerah survei, biaya pengukuran, biaya notaris dan pajak terkait, ditangguhkan dan disajikan secara terpisah dari biaya perolehan tanah. Biaya ditangguhkan tersebut diamortisasi selama ketentuan hukum hak atas tanah terkait dengan menggunakan metode garis lurus.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian pada periode/tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

**PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 September 2011 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010 (Diaudit) dan
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2011 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan untuk
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

k. Aset Tetap (lanjutan)

Sewa

Berdasarkan PSAK 30 (Revisi 2007), penentuan apakah suatu perjanjian merupakan perjanjian sewa atau perjanjian yang mengandung sewa didasarkan atas substansi perjanjian pada tanggal awal sewa dan apakah pemenuhan perjanjian tergantung pada penggunaan suatu aset dan perjanjian tersebut memberikan suatu hak untuk menggunakan aset tersebut. Menurut PSAK 30 (Revisi 2007) ini, sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset, diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan.

Selanjutnya, suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi, jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

Perusahaan dan Entitas Anak sebagai *lessee*

- i. Berdasarkan PSAK 30 (Revisi 2007), dalam sewa pembiayaan, Perusahaan dan Entitas Anak sebagai *lessee* mengakui aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan interim konsolidasian pada awal masa sewa, sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Pembayaran sewa dipisahkan antara bagian yang merupakan biaya keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan liabilitas sewa. Biaya keuangan dialokasikan pada setiap periode selama masa sewa, sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas. Rental kontinjen dibebankan pada periode terjadinya. Biaya keuangan dicatat dalam laporan laba rugi komprehensif interim konsolidasian.
- ii. Aset sewaan (disajikan sebagai bagian "Aset Tetap") disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara umur manfaat aset sewaan dan periode masa sewa, jika tidak ada kepastian yang memadai bahwa Perusahaan dan Entitas Anak akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa.
- iii. Dalam sewa operasi, Perusahaan dan Entitas Anak mengakui pembayaran sewa sebagai beban dengan metode garis lurus (*straight-line method*) selama masa sewa.

Perusahaan dan Entitas Anak sebagai *lessor*

- i. Berdasarkan PSAK 30 (Revisi 2007), dalam sewa pembiayaan, Perusahaan dan Entitas Anak mengakui aset berupa piutang sewa pembiayaan di laporan posisi keuangan interim konsolidasian sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto. Penerimaan piutang sewa diperlakukan sebagai pembayaran pokok dan pendapatan pembiayaan. Pengakuan pendapatan pembiayaan didasarkan pada suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi bersih sebagai *lessor* dalam sewa pembiayaan.
- ii. Dalam sewa operasi, Perusahaan dan Entitas Anak mengakui aset untuk sewa operasi di laporan posisi keuangan interim konsolidasian sesuai sifat aset tersebut. Biaya langsung awal sehubungan proses negosiasi sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui sebagai beban selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Rental kontinjen, apabila ada, diakui sebagai pendapatan pada periode terjadinya. Pendapatan sewa operasi diakui sebagai pendapatan atas dasar garis lurus selama masa sewa.

**PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 September 2011 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010 (Diaudit) dan
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2011 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan untuk
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

I. Aset Takberwujud

Efektif 1 Januari 2011, Perusahaan dan Entitas Anak menerapkan PSAK 19 (Revisi 2010), "Aset Takberwujud". PSAK 19 (Revisi 2010) mengatur perlakuan akuntansi untuk aset takberwujud yang tidak dibahas dengan khusus dalam PSAK lainnya, dan membutuhkan pengakuan suatu aset takberwujud jika dan hanya jika, kriteria tertentu terpenuhi, dan juga menentukan bagaimana mengukur jumlah tercatat aset takberwujud dan pengungkapan yang terkait. Penerapan PSAK 19 (Revisi 2010) tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan interim konsolidasian.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan suatu aset takberwujud diukur sebagai perbedaan antara hasil pelepasan bersih dan nilai tercatat bersih aset, dan diakui dalam laporan laba rugi komprehensif interim konsolidasian saat aset dihentikan pengakuannya.

m. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan

Efektif 1 Januari 2011, Perusahaan dan Entitas Anak menerapkan secara prospektif PSAK 48 (Revisi 2009), "Penurunan Nilai Aset", termasuk *goodwill* dan aset yang berasal dari kombinasi bisnis sebelum 1 Januari 2011.

PSAK 48 (Revisi 2009) menetapkan prosedur-prosedur yang diterapkan entitas agar aset dicatat tidak melebihi jumlah terpulihkannya. Suatu aset dicatat melebihi jumlah terpulihkannya jika jumlah tersebut melebihi jumlah yang akan dipulihkan melalui penggunaan atau penjualan aset. Pada kasus demikian, aset mengalami penurunan nilai dan pernyataan ini mensyaratkan entitas mengakui rugi penurunan nilai. PSAK yang direvisi ini juga menentukan kapan entitas membalik suatu rugi penurunan nilai dan pengungkapan yang diperlukan.

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan dan Entitas Anak menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset (yaitu aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas, aset takberwujud yang belum dapat digunakan, atau *goodwill* yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis) diperlukan, maka Perusahaan dan Entitas Anak membuat estimasi formal jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau UPK dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai dari operasi yang dilanjutkan diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian sebagai "rugi penurunan nilai". Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan bersih didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar terkini atas nilai waktu dari uang dan risiko spesifik dari aset. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Perusahaan dan Entitas Anak menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikasi nilai wajar yang tersedia.

**PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 September 2011 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010 (Diaudit) dan
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2011 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan untuk
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

m. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan (lanjutan)

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Kerugian penurunan nilai dari operasi yang dilanjutkan, jika ada, diakui pada laporan laba rugi komprehensif interim konsolidasian sesuai dengan kategori beban yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.

Penilaian dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan tahunan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain *goodwill* mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain *goodwill* dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi komprehensif interim konsolidasian. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

Goodwill diuji untuk penurunan setiap tahun (per 31 Desember) dan ketika keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai bagi *goodwill* ditetapkan dengan menentukan jumlah tercatat tiap UPK (atau kelompok UPK) dimana *goodwill* terkait. Jika jumlah terpulihkan dari UPK kurang dari jumlah tercatatnya, rugi penurunan nilai diakui. Kerugian penurunan nilai yang berhubungan dengan *goodwill* tidak dapat dibalik pada periode berikutnya.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi atas penurunan potensial atas nilai aset tetap dan *goodwill* pada tanggal 30 September 2011 dan 2010 dan 31 Desember 2010.

n. Hak atas Sewa Tanah

Entitas Anak menyewa tanah yang dicatat sebagai "Hak atas Sewa Tanah". Nilai sewa tanah diamortisasi dengan metode garis lurus sepanjang periode sewa. Biaya amortisasi yang bersangkutan dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif interim konsolidasian periode berjalan.

o. Tanah yang Belum Dikembangkan

Tanah yang belum dikembangkan dinilai berdasarkan harga perolehan, yang meliputi antara lain biaya pembebasan (ganti rugi), pengurusan surat-surat tanah dan pematangan tanah. Pada saat dimulainya pengembangan prasarana, nilai tanah tersebut akan direklasifikasikan ke akun aset tidak lancar lainnya.

**PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 September 2011 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010 (Diaudit) dan
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2011 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan untuk
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

p. Provisi

Efektif 1 Januari 2011, Perusahaan dan Entitas Anak menerapkan PSAK 57 (Revisi 2009), "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi". PSAK revisi ini diterapkan secara prospektif dan menetapkan kriteria pengakuan dan dasar pengukuran untuk provisi, liabilitas kontinjensi dan aset kontinjensi, dan memastikan informasi memadai telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan untuk memungkinkan para pengguna memahami sifat, waktu, dan jumlah yang terkait dengan informasi tersebut. Penerapan PSAK 57 (Revisi 2009) tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan interim konsolidasian.

Provisi diakui jika Perusahaan dan Entitas Anak memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) jika, sebagai akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinan penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan total kewajiban tersebut dapat diestimasi secara andal.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika kemungkinan besar tidak terjadi arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, maka provisi dibatalkan.

q. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Efektif 1 Januari 2011, Perusahaan dan Entitas Anak menerapkan PSAK 23 (Revisi 2010), "Pendapatan". PSAK 23 (Revisi 2010) ini mengidentifikasi terpenuhinya kriteria pengakuan pendapatan, sehingga pendapatan dapat diakui, dan mengatur perlakuan akuntansi atas pendapatan yang timbul dari transaksi dan kejadian tertentu, serta memberikan panduan praktis dalam penerapan kriteria mengenai pengakuan pendapatan. Penerapan PSAK 23 (Revisi 2010) tersebut tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap laporan keuangan interim konsolidasian.

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Perusahaan dan Entitas Anak dan jumlahnya dapat diukur secara handal. Pendapatan diukur pada nilai wajar lan yang diterima, tidak termasuk diskon, rabat dan pajak penjualan (PPN). Kriteria spesifik berikut juga harus dipenuhi sebelum pendapatan diakui:

Pendapatan Usaha

Pendapatan atas kamar hotel dan restoran diakui pada saat jasa dan barang telah diberikan kepada pelanggan atau tamu hotel.

Pendapatan sewa ruang diakui selama masa perjanjian sewa.

Pendapatan dan Beban Bunga

Untuk semua instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, pendapatan atau beban bunga dicatat dengan menggunakan metode suku bunga efektif, yaitu suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat, untuk nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Beban diakui pada saat terjadinya.

**PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 September 2011 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010 (Diaudit) dan
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2011 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan untuk
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

r. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal laporan posisi keuangan interim konsolidasian, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal tersebut. Jika ada keuntungan atau kerugian akan dikreditkan atau dibebankan pada usaha tahun berjalan.

Keuntungan atau kerugian atas selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui pada usaha periode/tahun berjalan.

Pada tanggal 30 September 2011 dan 2010 dan 31 Desember 2010, kurs yang digunakan masing-masing adalah sebagai berikut:

	<u>30 September 2011</u>	<u>30 September 2010</u>	<u>31 Desember 2010</u>
1 Dolar Amerika Serikat (1 US\$)	8.823	8.924	8.991
1 Dolar Singapura (1 Sin\$)	6.796,35	6.774.48	6.981
1 Ringgit Malaysia (1 RM)	2.768,01	2.891,78	2.916

s. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan tidak final

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak tahun berjalan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak pada masa mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas pada tanggal laporan posisi keuangan interim konsolidasian. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa mendatang.

Pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan interim konsolidasian. Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada usaha periode/tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas. Efek pajak tangguhan yang timbul dari akuisisi disajikan sebagai bagian dari akun "Aset atau Liabilitas Pajak Tangguhan".

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus di laporan posisi keuangan interim konsolidasian, kecuali aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk entitas yang berbeda, penyajian yang sama dilakukan untuk aset dan liabilitas pajak kini.

**PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 September 2011 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010 (Diaudit) dan
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2011 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan untuk
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

s. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak penghasilan final

Beban pajak kini sehubungan dengan penghasilan sewa yang telah dikenakan pajak penghasilan final diakui proporsional dengan jumlah pendapatan yang diakui pada periode/tahun berjalan untuk tujuan akuntansi. Selisih antara pajak penghasilan final yang telah dibayar dengan beban pajak penghasilan final pada periode/tahun berjalan diakui sebagai pajak dibayar di muka atau utang pajak.

Perbedaan nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final dengan dasar pengenaan pajaknya tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Perubahan terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima atau, jika diajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan ditetapkan.

t. Biaya Pinjaman

Perusahaan dan Entitas Anak menerapkan PSAK 26 (Revisi 2008), "Biaya Pinjaman", Entitas Anak mengkapitalisasi beban bunga dan biaya pinjaman lainnya yang digunakan untuk membiayai pembangunan atau instalasi aset tetap.

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, konstruksi atau pembuatan aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadi. Biaya pinjaman terdiri dari biaya bunga dan biaya lain yang ditanggung Perusahaan dan Entitas Anak sehubungan dengan peminjaman dana.

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya dan pengeluaran untuk aset dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat selesainya secara substansi seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya.

u. Liabilitas atas Imbalan Pasca Kerja

Perusahaan dan Entitas Anak mencatat liabilitas imbalan pasca kerja yang tidak didanai berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003 ("UU").

Perusahaan dan Entitas Anak mengakui liabilitas imbalan pasca kerja sesuai dengan PSAK 24 (Revisi 2004), "Imbalan Kerja". Pernyataan ini mengharuskan Perusahaan dan Entitas Anak mengakui seluruh imbalan kerja yang diberikan melalui program atau perjanjian formal dan informal, peraturan perundang-undangan atau peraturan industri, yang mencakup imbalan pasca-kerja, imbalan kerja jangka pendek dan jangka panjang lainnya, pesangon pemutusan hubungan kerja dan imbalan berbasis ekuitas.

Berdasarkan PSAK 24 (Revisi 2004), perhitungan estimasi liabilitas atas imbalan kerja berdasarkan UU, ditentukan dengan menggunakan metode penilaian aktuarial *projected-unit-credit*. Keuntungan dan kerugian aktuarial diakui sebagai penghasilan atau beban apabila akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial bersih yang belum diakui pada akhir tahun pelaporan sebelumnya melebihi 10% dari nilai kini imbalan pasti. Keuntungan dan kerugian ini diakui dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan rata-rata sisa masa kerja karyawan yang diperkirakan.

**PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 September 2011 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010 (Diaudit) dan
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2011 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan untuk
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

u. Liabilitas atas Imbalan Pasca Kerja (lanjutan)

Lebih lanjut, biaya jasa lalu atas pengenalan program manfaat pasti atau perubahan utang imbalan dari program yang ada diamortisasi dengan metode garis lurus sepanjang periode sampai imbalan tersebut menjadi hak atau *vested*.

Keuntungan atau kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian suatu program imbalan pasti diakui ketika kurtailmen atau penyelesaian terjadi.

Kurtailmen terjadi apabila salah satu dari kondisi berikut terpenuhi:

- i. Menunjukkan komitmennya untuk mengurangi secara signifikan jumlah pekerja yang ditanggung oleh program; atau,
- ii. Mengubah ketentuan dalam program imbalan pasti yang menyebabkan bagian yang material dari jasa masa depan pekerja tidak lagi memberikan imbalan atau memberikan imbalan yang lebih rendah.

Penyelesaian program terjadi ketika Perusahaan dan Entitas Anak melakukan transaksi yang menghapuskan semua kewajiban hukum atau konstruktif atas sebagian atau seluruh imbalan dalam program imbalan pasti.

v. Pelaporan Segmen

Efektif 1 Januari 2011, Perusahaan dan Entitas Anak menerapkan PSAK 5 (Revisi 2009), "Segmen Operasi". PSAK 5 (Revisi 2009) mengatur pengungkapan yang akan memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis yang mana entitas terlibat dan lingkungan ekonomi dimana entitas beroperasi. Penerapan PSAK 5 (Revisi 2009) tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan interim konsolidasian.

Segmen adalah komponen yang dapat dibedakan dari Perusahaan dan Entitas Anak yang terlibat baik dalam menyediakan produk dan jasa (segmen usaha), atau dalam menyediakan produk dan jasa dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen lainnya.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk item-item yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang memadai untuk segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar Perusahaan dan Entitas Anak dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

w. Laba per Saham

Sesuai dengan PSAK 56, "Laba per Saham", maka laba per saham dihitung dengan membagi laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar selama periode berjalan.

**PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 September 2011 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010 (Diaudit) dan
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2011 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan untuk
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

x. Kuasi Reorganisasi

Berdasarkan PSAK 51 (Revisi 2003) mengenai "Akuntansi Kuasi-Reorganisasi", kuasi-reorganisasi merupakan prosedur akuntansi yang mengatur Perusahaan merestrukturisasi ekuitasnya dengan mengeliminasi defisit dan menilai kembali seluruh aset dan liabilitasnya dengan nilai wajar untuk mendapatkan awal yang baik (*fresh start*) dengan laporan posisi keuangan konsolidasian menunjukkan nilai sekarang tanpa dibebani defisit karena saldo akumulasi defisit telah dieliminasi terhadap akun selisih penilaian aset dan liabilitas (termasuk selisih nilai transaksi perubahan ekuitas Entitas Asosiasi). Kuasi-reorganisasi dilakukan dengan metode reorganisasi akuntansi (*accounting reorganization method*).

Aset dan liabilitas dinilai kembali sebesar nilai wajarnya. Nilai wajar aset dan kewajiban ditentukan berdasarkan nilai pasar pada tanggal kuasi-reorganisasi. Bila nilai pasar tidak tersedia, estimasi nilai wajar didasarkan pada informasi terbaik yang tersedia dengan mempertimbangkan harga aset sejenis, dan teknik penilaian yang paling sesuai dengan karakteristik aset dan kewajiban yang bersangkutan. Untuk aset dan liabilitas tertentu, penilaian dilakukan sesuai dengan PSAK terkait.

Selisih penilaian aset dan liabilitas dibukukan pada masing-masing akun serta diukur dan disajikan sesuai dengan kebijakan akuntansi masing-masing akun terkait.

Sebagai hasil Kuasi-Reorganisasi per tanggal 31 Juli 2009, saldo defisit Perusahaan sebesar Rp 31.224.820.582 dieliminasi ke saldo penilaian kembali aset dan liabilitas (surplus revaluasi aset tetap sebesar Rp 75.685.960 dan selisih penilaian kembali investasi pada Entitas Asosiasi sebesar Rp 31.149.134.622) (lihat Catatan 33).

y. Instrumen Keuangan

Efektif 1 Januari 2010, Perusahaan dan Entitas Anak menerapkan PSAK 50 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan" dan PSAK 55 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", yang menggantikan PSAK 50, "Akuntansi Investasi Efek Tertentu" dan PSAK 55 (Revisi 1999), "Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai".

PSAK 50 (Revisi 2006) mengatur persyaratan tentang penyajian dari instrumen keuangan dan informasi yang harus diungkapkan di dalam laporan keuangan konsolidasian, sedangkan PSAK 55 (Revisi 2006) mengatur prinsip-prinsip dasar pengakuan dan pengukuran aset keuangan, liabilitas keuangan dan kontrak pembelian dan penjualan item non-keuangan. Pernyataan ini, antara lain, memberikan definisi dan karakteristik derivatif, kategori dari instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran, akuntansi lindung nilai dan penetapan dari hubungan lindung nilai.

Penerapan awal dari PSAK revisi di atas tidak menimbulkan penyesuaian transisi yang harus dicatat di dalam laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 1 Januari 2010.

**PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 September 2011 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010 (Diaudit) dan
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2011 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan untuk
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

y. Instrumen Keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan

Pengakuan awal

Aset keuangan dalam lingkup PSAK 55 (Revisi 2006) diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba atau rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, aset keuangan tersedia untuk dijual, atau sebagai derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif.

Pada tanggal 1 Januari 2010, Perusahaan dan Entitas Anak tidak memiliki aset keuangan selain kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lainnya dan jaminan. Perusahaan dan Entitas Anak menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan, jika diperbolehkan dan sesuai, akan mengevaluasi kembali pengklasifikasian aset tersebut pada setiap akhir periode keuangan.

Aset keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajar, dan dalam hal aset keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba atau rugi, ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba atau rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba atau rugi termasuk aset keuangan untuk diperdagangkan dan aset keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba atau rugi.

Aset derivatif diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali mereka ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba atau rugi disajikan dalam laporan posisi keuangan interim konsolidasian pada nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi komprehensif interim konsolidasian.

Investasi jangka pendek Perusahaan dan Entitas Anak termasuk dalam kategori ini.

**PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 September 2011 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010 (Diaudit) dan
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2011 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan untuk
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

y. Instrumen Keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran setelah pengakuan awal (lanjutan)

- Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan, yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Setelah pengakuan awal, aset keuangan tersebut dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dan keuntungan dan kerugian terkait diakui dalam laporan laba rugi komprehensif interim konsolidasian pada saat pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, demikian juga melalui proses amortisasi.

Perusahaan dan Entitas Anak memiliki kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lainnya dan jaminan dalam kategori ini.

- Investasi dimiliki hingga jatuh tempo (HTM)

Aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan diklasifikasi sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo jika Perusahaan dan Entitas Anak mempunyai maksud dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Setelah pengukuran awal, investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Metode ini menggunakan suku bunga efektif untuk mendiskonto penerimaan kas di masa yang akan datang selama perkiraan umur aset keuangan menjadi nilai tercatat bersihnya.

Laba atau rugi diakui pada laporan laba rugi komprehensif interim konsolidasian ketika investasi dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi.

Perusahaan dan Entitas Anak tidak mempunyai investasi HTM pada tanggal 30 September 2011 dan 2010 dan 31 Desember 2010.

**PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 September 2011 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010 (Diaudit) dan
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2011 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan untuk
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

y. Instrumen Keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran setelah pengakuan awal (lanjutan)

- Aset keuangan tersedia untuk dijual

Aset keuangan tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan dalam dua kategori sebelumnya. Setelah pengukuran awal, aset keuangan tersedia untuk dijual diukur dengan nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian yang belum terealisasi diakui dalam ekuitas sampai investasi tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas akan direklasifikasi ke laporan laba rugi komprehensif konsolidasian sebagai penyesuaian reklasifikasi.

Perusahaan dan Entitas Anak tidak mempunyai aset keuangan tersedia untuk dijual pada tanggal 30 September 2011 dan 2010 dan 31 Desember 2010.

Penghentian pengakuan aset keuangan

Penghentian pengakuan atas suatu aset keuangan, atau, bila dapat diterapkan untuk bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa, terjadi bila:

- i. hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- ii. Perusahaan dan Entitas Anak mentransfer hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tersebut tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan dan (a) secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, atau (b) secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Apabila Perusahaan dan Entitas Anak mentransfer hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau mengadakan kesepakatan penyerahan dan tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan tersebut dan juga tidak mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut, maka suatu aset keuangan baru diakui oleh Perusahaan dan Entitas Anak sebesar keterlibatannya yang berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut.

Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur sebesar jumlah terendah antara nilai aset yang ditransfer dan nilai maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali oleh Perusahaan dan Entitas Anak.

Pada saat penghentian pengakuan atas aset keuangan secara keseluruhan, maka selisih antara nilai tercatat dan jumlah dari (i) pembayaran yang diterima, termasuk aset baru yang diperoleh dikurangi dengan liabilitas baru yang ditanggung; dan (ii) keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas, harus diakui pada laporan laba rugi komprehensif interim konsolidasian.

PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 September 2011 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010 (Diaudit) dan
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2011 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan untuk
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

y. Instrumen Keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai dari aset keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan interim konsolidasian, Perusahaan dan Entitas Anak mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan dianggap telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari salah satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Bukti penurunan nilai dapat meliputi indikasi pihak peminjam atau kelompok pihak peminjam mengalami kesulitan keuangan signifikan, wanprestasi atau tunggakan pembayaran bunga atau pokok, terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya dan pada saat data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang, seperti meningkatnya tunggakan atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan wanprestasi.

- Aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi

Untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Perusahaan dan Entitas Anak pertama kali menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang jumlahnya tidak signifikan secara individual.

Jika Perusahaan dan Entitas Anak menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunannya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk ekspektasi kerugian kredit masa datang yang belum terjadi). Nilai kini estimasi arus kas masa datang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Jika pinjaman yang diberikan dan piutang memiliki suku bunga variabel, tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku.

**PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 September 2011 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010 (Diaudit) dan
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2011 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan untuk
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

y. Instrumen Keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai dari aset keuangan (lanjutan)

- Aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

Nilai tercatat aset tersebut dikurangi melalui penggunaan akun penyisihan dan jumlah kerugian tersebut diakui secara langsung dalam laporan laba rugi komprehensif interim konsolidasian. Pendapatan bunga tetap diakui berdasarkan nilai tercatat yang telah dikurangi, berdasarkan suku bunga efektif atas aset keuangan tersebut. Pinjaman yang diberikan dan piutang, bersama-sama dengan penyisihan terkait, akan dihapuskan pada saat tidak terdapat kemungkinan yang realistis atas pemulihan di masa mendatang dan seluruh agunan, jika ada, telah direalisasi atau telah dialihkan kepada Perusahaan dan Entitas Anak.

Jika, pada periode berikutnya, nilai estimasi kerugian penurunan nilai aset keuangan bertambah atau berkurang karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui ditambah atau dikurangi (dipulihkan) dengan menyesuaikan akun penyisihan. Pemulihan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset keuangan melebihi biaya perolehan diamortisasi yang seharusnya jika penurunan nilai tidak diakui pada tanggal pemulihan dilakukan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi komprehensif interim konsolidasian. Jika penghapusan kemudian dipulihkan, maka pemulihan tersebut diakui dalam laporan laba rugi komprehensif interim konsolidasian.

- Aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan

Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi atas instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi dan tidak dicatat pada nilai wajar karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal, maka jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dan nilai kini estimasi arus kas masa mendatang yang didiskontokan pada tingkat pengembalian yang berlaku di pasar untuk aset keuangan serupa. Kerugian penurunan nilai tersebut tidak dapat dipulihkan pada periode berikutnya.

ii. Liabilitas keuangan

Pengakuan awal

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK 55 (Revisi 2006) diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba atau rugi, utang dan pinjaman, atau derivatif yang ditetapkan untuk tujuan instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, jika sesuai, Perusahaan dan Entitas Anak menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

**PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 September 2011 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010 (Diaudit) dan
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2011 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan untuk
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

y. Instrumen Keuangan (lanjutan)

ii. Liabilitas keuangan (lanjutan)

Pengakuan awal (lanjutan)

Liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajar dan, dalam hal utang dan pinjaman, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Liabilitas keuangan Perusahaan dan Entitas Anak meliputi utang usaha, utang lainnya, biaya masih harus dibayar, pinjaman jangka panjang dan utang sewa pembiayaan.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Pengukuran liabilitas keuangan tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba atau rugi

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba atau rugi termasuk liabilitas keuangan untuk diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba atau rugi.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika mereka diperoleh untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat. Liabilitas derivatif juga diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif.

Keuntungan atau kerugian atas liabilitas dalam kelompok diperdagangkan diakui dalam laporan laba rugi komprehensif interim konsolidasian.

- Utang dan pinjaman

Setelah pengakuan awal, utang yang dikenakan bunga dan pinjaman selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Pada tanggal laporan posisi keuangan interim konsolidasian, biaya bunga yang masih harus dibayar dicatat secara terpisah dari pokok pinjaman terkait dalam bagian liabilitas lancar. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi komprehensif interim konsolidasian ketika liabilitas dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas tersebut dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Ketika sebuah liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui dalam laporan laba rugi komprehensif interim konsolidasian.

**PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 September 2011 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010 (Diaudit) dan
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2011 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan untuk
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

y. Instrumen Keuangan (lanjutan)

ii. Liabilitas keuangan (lanjutan)

Instrumen keuangan derivatif

Perusahaan dan Entitas Anak menandatangani kontrak swap valuta asing yang diperbolehkan, jika dianggap perlu, untuk tujuan mengelola risiko perubahan nilai tukar mata uang asing yang berasal dari utang Perusahaan dan Entitas Anak dalam mata uang asing. Instrumen keuangan derivatif tersebut tidak ditetapkan untuk suatu hubungan lindung nilai yang memenuhi syarat (*qualifying hedge relationship*) dan pada awalnya diakui pada nilai wajar pada tanggal kontrak derivatif ditandatangani dan kemudian diukur kembali pada nilai wajarnya. Derivatif dicatat sebagai aset keuangan saat memiliki nilai wajar positif dan sebagai liabilitas keuangan apabila memiliki nilai wajar negatif.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar derivatif selama periode berjalan yang tidak memenuhi persyaratan sebagai akuntansi lindung nilai diakui langsung pada laporan laba rugi komprehensif interim konsolidasian.

Aset dan liabilitas derivatif disajikan masing-masing sebagai aset dan liabilitas lancar. Derivatif melekat disajikan bersama dengan kontrak utamanya pada laporan posisi keuangan interim konsolidasian yang mencerminkan penyajian yang tepat atas seluruh arus kas pada masa datang dari instrumen tersebut secara keseluruhan.

Perubahan bersih nilai wajar instrumen derivatif dan penyelesaian dari instrumen derivatif dibebankan atau dikreditkan pada usaha periode berjalan.

iii. Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan interim konsolidasian jika, dan hanya jika, terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

iv. Nilai wajar instrumen keuangan

Nilai wajar instrumen keuangan yang secara aktif diperdagangkan di pasar keuangan yang teroganisir, ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga penawaran pasar yang berlaku pada penutupan pasar pada akhir periode pelaporan. Untuk instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian tersebut meliputi penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar; referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama; analisa arus kas yang didiskonto; atau model penilaian lainnya.

v. Biaya perolehan yang diamortisasi dari instrumen keuangan

Biaya perolehan yang diamortisasi diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penyisihan penurunan nilai dan pembayaran atau pengurangan pokok. Perhitungan ini mencakup seluruh premi atau diskonto pada saat akuisisi dan mencakup biaya transaksi serta komisi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

**PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 September 2011 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010 (Diaudit) dan
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2011 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan untuk
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

z. Penerapan Standar Akuntansi Revisi Lainnya yang Telah Direvisi

Selain standar akuntansi yang telah direvisi yang telah disebutkan sebelumnya pada tanggal 1 Januari 2011, Perusahaan dan Entitas Anak juga menerapkan standar akuntansi yang telah direvisi berikut, yang dianggap relevan terhadap laporan keuangan interim konsolidasian namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan kecuali bagi pengungkapan terkait:

- PSAK 8 (Revisi 2010) : Peristiwa Setelah Periode Pelaporan.
- PSAK 25 (Revisi 2009) : Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan.

3. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN

Pertimbangan

Penyusunan laporan keuangan interim konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan dan Entitas Anak yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan interim konsolidasian:

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Perusahaan dan Entitas Anak menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan pertimbangan bila definisi yang ditetapkan PSAK 55 (Revisi 2006) terpenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan dan Entitas Anak seperti diungkapkan pada Catatan 2y.

Penyisihan atas Penurunan Nilai Piutang Usaha

Perusahaan dan Entitas Anak mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa pelanggan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi liabilitas keuangannya. Dalam hal tersebut, Perusahaan dan Entitas Anak mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit dari pihak ketiga yang tersedia dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat provisi spesifik atas jumlah piutang pelanggan guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Perusahaan dan Entitas Anak. Provisi spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah penyisihan untuk piutang usaha. Nilai tercatat dari piutang usaha Perusahaan dan Entitas Anak sebelum penyisihan untuk penurunan nilai pada tanggal 30 September 2011 dan 2010 dan 31 Desember 2010 masing-masing adalah sebesar Rp 4.702.272.062, Rp 793.714.123 dan Rp 2.880.788.386. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 6.

**PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 September 2011 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010 (Diaudit) dan
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2011 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan untuk
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

3. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun/periode berikutnya, diungkapkan di bawah ini. Perusahaan dan Entitas Anak mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan interim konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali Perusahaan dan Entitas Anak. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Imbalan Kerja

Penentuan liabilitas imbalan kerja Perusahaan dan Entitas Anak bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Perusahaan dan Entitas Anak langsung diakui dalam laba atau rugi pada saat terjadinya. Sementara Perusahaan dan Entitas Anak berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perusahaan dan Entitas Anak dapat mempengaruhi secara material liabilitas imbalan kerja dan beban imbalan kerja bersih. Nilai tercatat atas liabilitas imbalan kerja Perusahaan dan Entitas Anak pada tanggal 30 September 2011 dan 2010 dan 31 Desember 2010 masing-masing adalah sebesar Rp 7.066.359.525, Rp 1.183.923.818 dan Rp 6.052.555.721. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 29.

Penyusutan Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 (empat) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Perusahaan dan Entitas Anak menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Nilai tercatat bersih atas aset tetap Perusahaan dan Entitas Anak pada tanggal 30 September 2011 dan 2010 dan 31 Desember 2010 masing-masing adalah sebesar Rp 151.182.598.368, Rp 75.897.669.709 dan Rp 110.351.997.525. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 10.

Penyisihan atas Kerugian dan Kerusakan Peralatan Hotel dan Restoran

Penyisihan atas kerugian dan kerusakan peralatan hotel dan restoran dihitung berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan, serta akan dikurangkan apabila terjadi kerugian dan kerusakan peralatan hotel dan restoran. Perubahan tingkat kerugian dan kerusakan peralatan hotel dan restoran dapat mempengaruhi secara material penyisihan atas kerugian dan kerusakan peralatan hotel dan restoran ini. Nilai tercatat bersih atas penyisihan atas kerugian dan kerusakan peralatan hotel dan restoran pada tanggal 30 September 2011 dan 2010 dan 31 Desember 2010 masing-masing adalah sebesar Rp 151.968.709, Rp 64.369.822 dan Rp 389.612.396 (Catatan 18).

**PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 September 2011 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010 (Diaudit) dan
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2011 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan untuk
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN (lanjutan)
Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Perusahaan dan Entitas Anak mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Aset Pajak Tangguhan

Entitas Anak mengakui aset pajak tangguhan atas rugi fiskal yang belum digunakan sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga rugi fiskal tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan oleh manajemen disyaratkan dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak dan strategi perencanaan pajak masa depan.

4. KAS DAN SETARA KAS

Akun ini terdiri dari:

	30 September 2011 (Tidak Diaudit)	31 Desember 2010 (Diaudit)
Kas		
Rupiah	575.073.985	998.104.517
Ringgit Malaysia (RM 2,9)	8.027	8.456
Dolar Amerika Serikat (US\$ 7.764)	-	69.806.100
Jumlah Kas	<u>575.082.012</u>	<u>1.067.919.073</u>
Bank		
Rupiah		
PT Bank Mega Tbk	3.350.402.952	3.596.017.149
PT Bank Central Asia Tbk	3.681.961.072	3.414.679.281
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	9.380.904.954	92.446.778
PT Bank Permata Tbk	1.787.746.357	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.545.923.457	3.031.867.121
PT Bank Internasional Indonesia Tbk	1.648.124.973	14.862.087
PT Bank Bukopin Tbk	1.153.794.526	348.351.858
PT Bank Victoria International Tbk	1.503.621.191	228.830.787
PT Bank CIMB Niaga Tbk	39.501.080	31.744.757
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	216.240.361	108.586.798
PT Bank Windu Kentjana International Tbk	92.309.195	54.282.938
PT Bank DKI	16.204.784	-
PT Bank Mayapada International Tbk	8.498.917	67.652.305
Dipindahkan	<u>25.425.233.819</u>	<u>10.989.321.859</u>

**PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 September 2011 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010 (Diaudit) dan
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2011 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan untuk
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

	30 September 2011 (Tidak Diaudit)	31 Desember 2010 (Diaudit)
Pindahan	25.425.233.819	10.989.321.859
Dolar Amerika Serikat		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (US\$ 115.051 pada tanggal 30 Sep 2011 dan US\$ 74.949 pada tanggal 31 Desember 2010)	1.015.098.364	673.953.923
PT Bank Central Asia Tbk (US\$ 12.857 pada tanggal 30 Sep 2011 dan US\$ 22.053 pada tanggal 31 Desember 2010)	113.436.694	202.029.156
PT Bank Mega Tbk (US\$ 71.008 pada tanggal 30 Sep 2011 dan US\$ 150.294 pada tanggal 31 Desember 2010)	626.503.231	1.351.293.894
PT Bank Danamon Indonesia Tbk (US\$ 646 pada tanggal 30 Sep 2011 dan US\$ 741 pada tanggal 31 Desember 2010)	5.703.628	6.659.184
PT Bank Permata Tbk (US\$ 617 pada tanggal 30 Sep 2011)	5.445.587	-
Dolar Singapura		
PT Bank Mega Tbk (SIN\$ 2.375 pada tanggal 30 Sep 2011 dan SIN\$ 2.465 pada tanggal 31 Desember 2010)	16.143.302	17.209.227
Jumlah Bank	27.207.564.625	13.240.467.243
Deposito Berjangka		
Rupiah		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	24.600.000.000
PT Bank Mayapada International Tbk	-	28.052.204.140
PT Bank Bukopin Tbk	800.000.000	10.000.000.000
PT Bank DKI	7.000.000.000	-
PT Bank Mega Tbk	4.036.203.295	-
PT Bank Windu Kentjana International Tbk	-	8.753.128.767
PT Bank Tabungan Negara	-	3.100.000.000
Dolar Amerika Serikat		
PT Bank Mayapada International Tbk (US\$ 700.660)	-	6.299.637.566
Jumlah Deposito Berjangka	11.836.203.295	80.804.970.473
Jumlah Kas dan Setara Kas	39.618.849.932	95.113.356.789

Tingkat suku bunga deposito berjangka dalam Rupiah berkisar masing-masing sebesar 4% sampai 8,25% per tahun untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2011 dan 7% sampai 8,5% per tahun untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, sedangkan tingkat suku bunga deposito berjangka dalam mata uang Dolar Amerika Serikat sebesar 1% per tahun untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

**PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 September 2011 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010 (Diaudit) dan
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2011 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan untuk
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. INVESTASI JANGKA PENDEK

Akun ini terdiri dari:

	30 September 2011 (Tidak Diaudit)	31 Desember 2010 (Diaudit)
Investasi efek yang tersedia untuk diperdagangkan (<i>trading</i>) serta disajikan dengan nilai wajar:		
PT Bakrie Sumatra Plantations	570.000.000	780.000.000
Investasi melalui Manajer Investasi:		
Amaris Global Limited (Amaris)	23.200.000.000	23.700.000.000
Asia Pacific Venture (L) Limited (APV)	9.608.847.208	21.954.204.983
Torrance Company Limited (Torrance)	-	10.000.000.000
Jumlah	32.808.847.208	55.654.204.983
Jumlah	33.378.847.208	56.434.204.983

Investasi melalui Amaris:

Berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Dana tanggal 29 Desember 2008, PT Eka Ilalang Suryadinamika (EIS), Entitas Anak, menunjuk Amaris untuk mengelola dana EIS sebesar Rp 18,1 miliar dalam bentuk efek untuk jangka waktu 1 tahun dan akan diperpanjang satu tahun berikutnya kecuali bila salah satu pihak menyatakan mengakhiri perjanjian. Pada tanggal 30 Sep 2011 dan 31 Desember 2010, sisa dana ditempatkan masing-masing sebesar Rp 14,7 miliar.

Pada tanggal 30 Juni 2010, PT Grahatama Indah Lestari (GIL), entitas anak PT Mega Biru Selaras (MBS), Entitas Anak, menandatangani Perjanjian Pengelolaan Dana dengan Amaris untuk mengelola dana GIL dalam bentuk efek sebesar maksimum Rp 5,5 miliar. Kontrak ini mempunyai jangka waktu 1 (satu) tahun dan akan diperpanjang satu tahun berikutnya kecuali bila salah satu pihak menyatakan mengakhiri perjanjian. Pada tanggal 30 Sep 2011 dan 31 Desember 2010, sisa dana ditempatkan masing-masing sebesar Rp 5,5 miliar.

Pada tanggal 24 November 2009, PT Saranausaha Jaya (SJ), Entitas Anak, menandatangani Perjanjian Pengelolaan Dana dengan Amaris untuk mengelola dana SJ dalam bentuk efek sebesar maksimum Rp 4,75 miliar. Kontrak ini mempunyai jangka waktu 1 (satu) tahun dan akan diperpanjang satu tahun berikutnya kecuali bila salah satu pihak menyatakan mengakhiri perjanjian. Pada tanggal 30 Sep 2011 dan 31 Desember 2010, sisa dana ditempatkan masing-masing sebesar Rp 3 miliar dan Rp 3,5 miliar.

Investasi melalui APV:

Pada tanggal 4 Desember 2008, PT Karsa Citra Unggul (KCU), Entitas Anak, menandatangani Perjanjian Pengelolaan Dana dengan APV untuk mengelola dana KCU sebesar Rp 900.000.000 dalam bentuk efek yang berpenghasilan tetap untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan telah diperpanjang sampai dengan tanggal 4 Mei 2012. Pada tanggal 30 Sep 2011 dan 31 Desember 2010, sisa dana ditempatkan masing-masing sebesar Rp 420.777.208 dan Rp 410.822.815.

**PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 September 2011 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010 (Diaudit) dan
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2011 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan untuk
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

5. INVESTASI JANGKA PENDEK (lanjutan)

Investasi melalui APV: (lanjutan)

Berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Dana dengan APV tertanggal 17 November 2008, PT Kega Property Utama (KPU), entitas anak KCU, menunjuk APV untuk mengelola dana KPU sebesar Rp 10.355.000.000 dalam bentuk efek yang berpenghasilan tetap untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan telah diperpanjang penempatannya sampai dengan tanggal 17 November 2011. Pada tanggal 30 Sep 2011 dan 31 Desember 2010, sisa dana ditempatkan adalah sebesar Rp 9.188.070.000.

Pada tanggal 4 Desember 2008, PT Retzan Indonusa (RIN), Entitas Anak, menandatangani Perjanjian Pengelolaan Dana dengan APV untuk mengelola dana RIN senilai Rp 21.500.000.000 dalam bentuk surat berharga yang likuid untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan diperpanjang secara otomatis 1 (satu) tahun mendatang kecuali terdapat keinginan dari salah satu pihak untuk mengakhiri perjanjian ini. Pada tanggal 31 Desember 2010, sisa dana ditempatkan sebesar Rp 8.054.808.168. Pada bulan Juni 2011, penempatan investasi telah dicairkan oleh RIN.

Berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Dana dengan APV tertanggal 15 Oktober 2008, PT Mega Biru Selaras (MBS), Entitas Anak, menunjuk APV untuk mengelola dana MBS sebesar Rp 18.000.000.000 dalam bentuk efek untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Pada tanggal 31 Desember 2010, sisa dana ditempatkan sebesar Rp 4.300.504.000 diperpanjang penempatannya sampai dengan 15 Oktober 2011. Pada bulan Juni 2011, penempatan investasi telah dicairkan oleh MBS.

Investasi melalui Torrance:

Berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Dana dengan Torrance tertanggal 13 Desember 2010, Perusahaan menunjuk Torrance untuk mengelola dana Perusahaan sebesar Rp 10 miliar dalam bentuk surat berharga yang likuid untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan diperpanjang secara otomatis 1 (satu) tahun mendatang kecuali terdapat keinginan dari salah satu pihak untuk mengakhiri perjanjian. Pada bulan Maret 2011, penempatan investasi telah dicairkan oleh Perusahaan.

6. PIUTANG USAHA DENGAN PIHAK KETIGA

Rincian piutang usaha dengan pihak ketiga berdasarkan langganan terdiri dari:

	30 September 2011 (Tidak Diaudit)	31 Desember 2010 (Diaudit)
Guest Ledger	519.194.775	751.271.566
City Ledger	2.795.580.305	2.129.516.820
Credit Card	158.015.936	-
Lain-lain	1.229.481.046	-
Jumlah	4.702.272.062	2.880.788.386
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai	(5.441.551)	-
Neto	4.696.830.511	2.880.788.386

**PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 September 2011 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010 (Diaudit) dan
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2011 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan untuk
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. PIUTANG USAHA DENGAN PIHAK KETIGA (lanjutan)

Rincian umur piutang usaha dengan pihak ketiga berdasarkan tanggal faktur adalah sebagai berikut:

	30 September 2011 (Tidak Diaudit)	31 Desember 2010 (Diaudit)
Belum jatuh tempo	1.028.623.635	2.211.339.857
Jatuh tempo:		
1 - 30 hari	2.311.683.008	540.879.162
31 - 60 hari	1.284.031.272	124.809.182
61 - 90 hari	69.951.046	3.760.185
Lebih dari 90 hari	7.983.100	-
Jumlah	4.702.272.062	2.880.788.386
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai	(5.441.551)	-
Neto	4.696.830.511	2.880.788.386

Perubahan saldo penyisihan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	30 September 2011 (Tidak Diaudit)	31 Desember 2010 (Diaudit)
Saldo awal periode	-	117.876.779
Penyisihan tahun berjalan	5.441.551	-
Penghapusan penyisihan	-	(117.876.779)
Saldo akhir periode	5.441.551	-

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai cukup untuk menutup kerugian yang timbul dari tidak tertagihnya piutang. Manajemen juga berpendapat bahwa tidak terdapat risiko yang terkonsentrasi secara signifikan atas piutang usaha.

**PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 September 2011 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010 (Diaudit) dan
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2011 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan untuk
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Rincian transaksi dan saldo transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	30 September 2011 (Tidak Diaudit)	31 Desember 2010 (Diaudit)	Persentase (%) dari jumlah aset/liabilitas	
			30 September 2011 (Tidak Diaudit)	31 Desember 2010 (Diaudit)
Piutang lainnya:				
PT Kega Kharisma Utama	489.100.000	-	0,05	-
PT Oasis Hotel Bogor	185.717.816	175.717.816	0,02	0,02
PT Grahatama Kreasibaru	320.000.000	275.000.000	0,03	0,03
PT Kega Property Utama	-	506.749.000	-	0,06
Jumlah	994.817.816	957.466.816	0,10	0,11
Utang lainnya:				
PT Sinar Monexindo	3.963.100.000	15.233.100.000	1,16	7,38
Direksi PT Karsa				
Citra Unggul	9.092.000	206.444.500	0,00	0,10
Jemmy Asiku	127.225.472	83.295.472	0,04	0,04
Jumlah	4.099.417.472	15.522.839.972	1,20	7,52

Piutang dan utang kepada pihak-pihak berelasi terutama timbul dari biaya-biaya operasional yang dibayarkan terlebih dahulu oleh pihak-pihak berelasi dan/atau sebaliknya. Atas piutang dan utang tersebut tidak dikenakan bunga.

Transaksi pendapatan dan beban dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan tingkat harga sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga.

Sifat hubungan dengan pihak-pihak berelasi di atas adalah sebagai berikut:

- a. PT Kega Property Utama merupakan entitas anak PT Karsa Citra Unggul (Entitas Anak).
- b. PT Grahatama Kreasibaru merupakan pemegang saham Perusahaan.
- c. PT Oasis Hotel Bogor merupakan entitas asosiasi dari PT Karsa Citra Unggul (Entitas Anak).
- d. PT Kega Kharisma Utama merupakan perusahaan yang sebagian pengurus atau manajemennya sama dengan pengurus atau manajemen Perusahaan.
- e. Jemmy Asiku merupakan pemegang saham PT Cakra Guna Dharma Eka, entitas anak PT Mega Biru Selaras (Entitas Anak)
- f. PT Sinar Monexindo merupakan pemegang saham minoritas PT Aneka Bina Laras, Entitas Anak.

**PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 September 2011 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010 (Diaudit) dan
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2011 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan untuk
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. PERSEDIAAN

Akun ini terdiri dari:

	30 September 2011 (Tidak Diaudit)	31 Desember 2010 (Diaudit)
Makanan dan minuman	305.901.593	216.629.020
Perlengkapan hotel	459.634.547	139.608.243
Lain-lain	91.352.101	204.188.931
Jumlah	856.888.241	560.426.194

Berdasarkan penelaahan atas kondisi fisik persediaan pada akhir tahun, manajemen Perusahaan dan Entitas Anak berkeyakinan bahwa persediaan telah mencerminkan nilai realisasi netonya, sehingga tidak perlu dilakukan penyisihan penurunan nilai atas persediaan tersebut.

9. PENYERTAAN SAHAM

30 September 2011 (Tidak Diaudit)

	Persentase Kepemilikan	Nilai Tercatat 1 Januari 2011	Bagian atas Laba (Rugi) Neto Entitas Asosiasi	Penambahan (Pengurangan) Penyertaan	Nilai Tercatat 30 September 2011
Metode Ekuitas					
PT Oasis Hotel Bogor (OHB) *	50,00%	4.784.675.038	(9.610.064)	-	4.775.064.975
PT Omega Propertindo (OP)	33,34%	19.990.281.142	687.359.197	-	20.677.640.339
PT Java Paradise Island (JPI)	27,50%	18.866.333.307	1.254.896.905	-	20.121.230.212
Jumlah		43.641.289.487	1.932.646.038	-	45.573.935.525

31 Desember 2010 (Diaudit)

	Persentase Kepemilikan	Nilai Tercatat 1 Januari 2010	Bagian atas Laba (Rugi) Neto Entitas Asosiasi	Penambahan (Pengurangan) Penyertaan	Nilai Tercatat 31 Desember 2010
Metode Ekuitas					
PT Oasis Hotel Bogor (OHB) *	50,00%	4.798.850.894	(14.175.856)	-	4.784.675.038
PT Indonesian Paradise Island (IPI) **	48,75%	252.423.931.075	-	(252.423.931.075)	-
PT Omega Propertindo (OP)	33,34%	18.198.591.282	1.791.689.860	-	19.990.281.142
PT Java Paradise Island (JPI)	27,50%	17.673.341.469	1.192.991.838	-	18.866.333.307
Jumlah		293.094.714.720	2.970.505.842	(252.423.931.075)	43.641.289.487

* melalui PT Karsa Citra Unggul, Entitas Anak

** dikonsolidasikan sejak 23 Desember 2010 (lihat Catatan 1d)

**PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 September 2011 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010 (Diaudit) dan
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2011 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan untuk
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. PENYERTAAN SAHAM (lanjutan)

Pada tanggal 23 Desember 2010, Perusahaan meningkatkan kepemilikannya pada IPI sebesar 16,25% dari 48,75% menjadi 65% melalui pembelian saham dari Dana Pensiun Bank Indonesia dengan biaya perolehan Rp 87.750.000.000. Pembelian saham ini telah dinyatakan dalam Akta Jual Beli Saham No. 243 tanggal 23 Desember 2010 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta. Akibat peningkatan kepemilikan ini, IPI menjadi Entitas Anak dan laporan keuangannya dikonsolidasikan sejak 23 Desember 2010 (Catatan 1d).

10. ASET TETAP

Akun ini terdiri dari:

	30 September 2011 (Tidak Diaudit)			
	1 Januari 2011	Penambahan	Pengurangan	30 September 2011
Nilai Tercatat				
<u>Pemilikan Langsung</u>				
Hak atas tanah	42.681.943.984	-	-	42.681.943.984
Bangunan dan prasarana	96.779.339.087	37.332.904.824	425.225.000	133.687.018.911
Peralatan dan perlengkapan	18.643.098.514	8.358.508.872	10.000.000	26.991.607.386
Kendaraan	1.700.061.292	563.250.000	-	2.263.311.292
Sub jumlah	159.804.442.877	46.254.663.696	435.225.000	205.623.881.573
<u>Sewa Pembiayaan</u>				
Kendaraan	752.250.000	747.700.000	-	1.499.950.000
Jumlah Nilai Tercatat	160.556.692.877	47.002.363.696	435.225.000	207.123.831.573
Akumulasi Penyusutan				
<u>Pemilikan Langsung</u>				
Bangunan dan prasarana	37.562.215.652	3.808.820.276	70.777.230	41.300.258.698
Peralatan dan perlengkapan	11.824.427.255	1.737.067.728	17.118.140	13.544.376.843
Kendaraan	729.437.862	170.363.578	-	899.801.440
Sub jumlah	50.116.080.769	5.716.251.582	87.895.370	55.744.436.981
<u>Sewa Pembiayaan</u>				
Kendaraan	88.614.583	108.181.641	-	196.796.224
Jumlah Akumulasi Penyusutan	50.204.695.352	5.824.433.223	87.895.370	55.941.233.205
Nilai Buku	110.351.997.525			151.182.598.368

**PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 September 2011 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010 (Diaudit) dan
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2011 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan untuk
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. ASET TETAP (lanjutan)

	31 Desember 2010 (Diaudit)			
	1 Januari 2010	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2010
Nilai Tercatat				
<u>Pemilikan Langsung</u>				
Hak atas tanah	32.394.354.523	2.359.500.000 ^{^^} 4.850.512.476 3.077.576.985#	-	42.681.943.984
Bangunan dan prasarana	23.957.215.397	89.881.920 1.640.500.000 ^{^^} 74.200.626.005#	3.000.000.000 108.884.235*	96.779.339.087
Peralatan dan perlengkapan	5.421.731.211	1.101.039.114 12.011.443.954#	-	18.643.098.514
Kendaraan	464.434.099	108.884.235* 591.595.173 869.572.119#	225.540.099**	1.700.061.292
Sub jumlah	62.237.735.230	6.633.028.683 4.000.000.000 ^{^^} 108.884.235* 90.159.219.063#	3.000.000.000 108.884.235* 225.540.099**	159.804.442.877
<u>Sewa Pembiayaan</u>				
Kendaraan	290.000.000	492.250.000#	30.000.000**	752.250.000
Jumlah Nilai Tercatat	62.527.735.230	6.633.028.683 4.000.000.000 ^{^^} 108.884.235* 90.651.469.063#	3.000.000.000 108.884.235* 255.540.099**	160.556.692.877
Akumulasi Penyusutan				
<u>Pemilikan Langsung</u>				
Bangunan dan prasarana	8.506.934.666	4.750.371.718 26.092.409.268#	1.787.500.000	37.562.215.652
Peralatan dan perlengkapan	3.601.929.512	1.784.258.461 6.438.239.282#	-	11.824.427.255
Kendaraan	228.619.249	154.032.089 346.786.524#	-	729.437.862
Sub jumlah	12.337.483.427	6.688.662.268 32.877.435.074#	1.787.500.000	50.116.080.769
<u>Sewa Pembiayaan</u>				
Kendaraan	12.083.334	76.531.249	-	88.614.583
Jumlah Akumulasi Penyusutan	12.349.566.761	6.765.193.517 32.877.435.074#	1.787.500.000	50.204.695.352
Nilai Buku	50.178.168.469			110.351.997.525

*) Perubahan atas kenaikan dan penurunan nilai aset tetap dari hasil revaluasi aset tetap

***) Penyesuaian

^) Reklasifikasi dari aset sewa pembiayaan ke pemilikan langsung

^^) Reklasifikasi dari uang muka perolehan tanah

Ⓢ) Reklasifikasi dari aset tidak lancar lainnya (Catatan 16)

#) Aset Entitas Anak (IPI) yang dikonsolidasikan sejak 23 Desember 2010

**PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 September 2011 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010 (Diaudit) dan
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2011 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan untuk
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

10. ASET TETAP (lanjutan)

Beban penyusutan dibebankan ke dalam beban operasi masing-masing adalah sebesar Rp 5.824.433.223, Rp 1.392.512.345 dan Rp 6.765.193.517 untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2011 dan 2010 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

Penambahan aset tetap di tahun 2010 termasuk aset tetap entitas anak yang diakuisisi (PT Indonesian Paradise Island) dengan nilai buku Rp 57.774.033.989.

Pada tahun 2008, Perusahaan memperoleh tanah yang berlokasi di Tebet, Jakarta berupa Hak Guna Bangunan (HGB) No. 2682 seluas 237 meter persegi atas nama Perusahaan. HGB tersebut akan jatuh tempo pada tahun 2021 dan menurut Perusahaan hak tersebut dapat diperpanjang pada saat jatuh tempo.

Perusahaan menguasai sebidang tanah yang terletak di Tuban, Bali dengan Hak Guna Bangunan (HGB) No. 851 seluas 2.700 meter persegi atas nama Perusahaan. HGB tersebut akan jatuh tempo pada tahun 2034 dan menurut Perusahaan hak tersebut dapat diperpanjang pada saat jatuh tempo.

Pada tahun 2010, Perusahaan memperoleh tanah yang terletak di Kuta, Bali dengan Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 990/Kuta seluas 1.800 meter persegi atas nama Perusahaan. HGB tersebut akan jatuh tempo pada tahun 2040 dan menurut Perusahaan hak tersebut dapat diperpanjang pada saat jatuh tempo

PT Eka Ilalang Suryadinamika (EIS), Entitas Anak, memiliki 4 (empat) bidang tanah seluas 12.498 meter persegi yang terletak di Sentul City, Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sesuai dengan akta jual beli No. 121/2007, No 122/2007, No 123/2007, No. 124/2007, No. 125/2007, No. 126/2007, No. 127/2007 dan No. 128/2007 tertanggal 18 Juni 2007 dari Niken Larasati, SH, Notaris PPAT di Bogor. Sampai dengan tanggal laporan auditor independen, hak tanah masih dalam proses balik nama menjadi atas nama EIS.

PT Langgeng Cipta Karya (LCK), Entitas Anak, mempunyai 1 (satu) bidang tanah seluas 2.120 meter persegi yang terletak di desa Kedewatan, Ubud, Bali, dengan hak legal berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2361/Desa Kedewatan atas nama I Gusti Ngurah Oka Budiasa. Sampai dengan tanggal laporan auditor independen, hak tanah masih dalam proses balik nama menjadi atas nama LCK.

PT Retzan Indonusa (RIN), Entitas Anak, memiliki 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Kecamatan Batam Kota, Kelurahan Teluk Tering, Batam, Kepulauan Riau dengan luas 5.638 meter persegi dan 1.361 meter persegi dengan hak legal berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) selama 30 (tiga puluh) tahun yang berakhir pada tahun 2018. RIN juga memiliki bangunan berikut tanah yang terletak di Komplek Center Point, Pulau Batam dengan hak legal berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang akan berakhir pada tahun 2018. Manajemen RIN berpendapat tidak terdapat masalah dengan perpanjangan hak atas tanah karena seluruh tanah diperoleh secara sah dan didukung dengan bukti pemilikan yang sah.

Pada tahun 2010, PT Grahatama Indah Lestari (GIL), entitas anak PT Mega Biru Selaras (Entitas Anak) menjual bangunan yang nilai bukunya sebesar Rp 1.212.500.000 dengan harga jual sebesar Rp 4.231.660.848 sehingga GIL memperoleh laba penjualan aset tetap sebesar Rp 3.019.160.848 yang disajikan sebagai pendapatan operasi lainnya pada laporan laba rugi komprehensif interim konsolidasian.

**PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 September 2011 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010 (Diaudit) dan
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2011 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan untuk
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

10. ASET TETAP (lanjutan)

Aset tetap Perusahaan dan Entitas Anak tertentu, kecuali tanah, diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 48,938 miliar (Perusahaan), Rp 82,358 miliar dan US\$ 100.000 (Entitas Anak) pada tanggal 30 September 2011 dan 31 Desember 2010. Manajemen Perusahaan dan Entitas Anak berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko tersebut.

Aset tetap Perusahaan dan Entitas Anak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman jangka panjang (Catatan 22).

Berdasarkan penelaahan manajemen Perusahaan dan Entitas Anak, tidak terdapat kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap pada tanggal 30 September 2011 dan 2010 dan 31 Desember 2010.

11. HAK ATAS SEWA TANAH JANGKA PANJANG

Akun ini merupakan pembayaran hak atas sewa tanah yang direncanakan untuk dikembangkan oleh Entitas Anak dengan rincian sebagai berikut:

	30 September 2011 (Tidak Diaudit)	31 Desember 2010 (Diaudit)
Hak sewa apartemen fX Residence, Jakarta (lihat Catatan 31c)	40.810.000.000	40.810.000.000
Uang muka hak sewa tanah jangka panjang Hak pemanfaatan tanah di Jalan AM Sangaji, Yogyakarta (lihat Catatan 31c)	7.249.705.938	5.801.805.938
Hak sewa tanah di Ubud, Bali (lihat Catatan 31c)	816.816.000	816.816.000
	587.200.000	587.200.000
Jumlah	49.463.721.938	48.015.821.938
Akumulasi amortisasi hak sewa	(336.953.866)	(301.853.467)
Neto	49.126.768.072	47.713.968.471

Uang muka hak sewa tanah jangka panjang terdiri dari:

- Uang muka atas hak sewa beberapa tanah seluas 472.410 meter persegi dengan jangka waktu sewa selama 30 tahun yang terletak di Desa Buah Kaja, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Bali oleh PT Grahutama Indah Lestari (GIL), entitas anak PT Mega Biru Selaras (Entitas Anak). Saldo uang muka pada tanggal 30 September 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing adalah sebesar Rp 7.115.305.938 dan Rp 5.801.805.938.
- Uang muka atas hak sewa tanah seluas 2.443 meter persegi dengan jangka waktu sewa selama 30 tahun yang terletak di Jalan Danau Tamblingan No. 40, Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kabupaten Badung, Bali oleh PT Segara Biru Kencana (SBK), entitas anak PT Karsa Citra Unggul (Entitas Anak). Saldo uang muka pada tanggal 30 September 2011 adalah sebesar Rp 134.400.000.

**PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 September 2011 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010 (Diaudit) dan
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2011 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan untuk
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. TANAH YANG BELUM DIKEMBANGKAN

PT Karsa Citra Unggul (KCU), Entitas Anak, memiliki 2 (dua) bidang tanah yang belum dikembangkan seluas 2.144 meter persegi yang terletak di Desa Sario Tumpaan, Manado Selatan, Sulawesi Utara, dengan hak legal berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 105/Desa Sario Tumpaan seluas 1.033 meter persegi dan SHGB No. 106/Desa Sario Tumpaan seluas 1.111 meter persegi masing-masing atas nama KCU. Harga perolehan tanah ini sebesar Rp 11.059.895.000.

PT Cakra Guna Dharma Eka (CGDE), entitas anak PT Mega Biru Selaras (Entitas Anak), memiliki beberapa bidang tanah yang belum dikembangkan dengan total luas 622.815 meter persegi yang terletak di Desa Waleo, Manado, Sulawesi Utara yang telah disertifikasi atas nama CGDE yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang terdiri dari SHGB No. 01/Desa Waleo sampai dengan No. 23/Desa Waleo tanggal 4 September 2003; dan SHGB No. 1/Desa Makalisung tanggal 4 September 2003. Saldo harga perolehan tanah ini pada tanggal 30 September 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp 1.555.518.798 dan Rp 1.555.015.798.

13. GOODWILL

a. Goodwill Positif

	30 September 2011 (Tidak Diaudit)	31 Desember 2010 (Diaudit)
Perusahaan:		
- PT Indonesian Paradise Island (IPI)	205.335.054.587	239.383.865.993
- PT Saranausaha Jaya (SJ)	10.786.166	10.786.166
- PT Dinamika Putra Perkasa (DPP)	6.237.781	6.237.781
Entitas Anak:		
- PT Dinamika Putra Perkasa (DPP)	590.804.106	590.804.106
- PT Mega Biru Selaras (MBS)	6.549.790	6.549.790
Jumlah	205.949.432.430	239.998.243.836

Saldo *goodwill* positif untuk IPI pada tanggal 31 Desember 2010 terdiri dari transaksi akuisisi pada tanggal 23 Desember 2010 sejumlah Rp 55.329.318.535 (lihat Catatan 1d) dan selisih revaluasi atas Kuasi-Reorganisasi pada tanggal 31 Juli 2009 sejumlah Rp 184.054.547.458 (lihat Catatan 9 dan 33). Pada tanggal 13 Juni 2011, saldo *goodwill* tersebut telah disesuaikan sehubungan dengan penjualan kepemilikan IPI sebesar 10% (Catatan 1b).

Goodwill positif atas SJ dan DPP berasal dari Penggabungan Usaha antara Perusahaan dan TSW, sedangkan untuk DPP merupakan *goodwill* atas akuisisi PT Magna Terra dan untuk MBS merupakan *goodwill* atas akuisisi PT Grahata Indah Lestari.

b. Goodwill Negatif

Saldo *goodwill* negatif pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp 112.613.338 merupakan selisih lebih nilai buku atas biaya perolehan akuisisi PT Cakra Guna Dharma Eka oleh PT Mega Biru Selaras (MBS), Entitas Anak. Sejak tanggal 1 Januari 2011, *goodwill* negatif tersebut telah dihapuskan oleh MBS pada saldo laba awal tahun per 1 Januari 2011 sesuai yang disyaratkan dalam PSAK 22 (Revisi 2010).

Akibat penyesuaian saldo laba awal tahun tersebut, Perusahaan mencatat adanya selisih nilai transaksi perubahan ekuitas entitas anak sebesar Rp 112.233.268.

**PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 September 2011 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010 (Diaudit) dan
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2011 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan untuk
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. BIAYA DITANGGUHKAN

	30 September 2011 (Tidak Diaudit)	31 Desember 2010 (Diaudit)
Saldo awal	21.811.918.057	2.633.866.639
Penambahan selama tahun berjalan	2.983.330.117	19.178.051.418
Saldo akhir	24.795.248.174	21.811.918.057
Amortisasi:		
- Saldo awal	(776.770.912)	(79.359.212)
- Amortisasi tahun berjalan	(1.862.945.150)	(697.411.700)
Jumlah	22.155.532.112	21.035.147.145

Biaya ditangguhkan merupakan biaya perolehan hak kepemilikan tanah dan hak guna bangunan dan diamortisasi sepanjang periode hak atas tanah atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek, dengan metode garis lurus. Penambahan biaya ditangguhkan pada tahun 2010 termasuk biaya ditangguhkan Entitas Anak yang dikonsolidasi pada akhir tahun 2010 dengan nilai buku Rp 10.685.442.298.

15. UANG MUKA PEROLEHAN ASET TETAP

	30 September 2011 (Tidak Diaudit)	31 Desember 2010 (Diaudit)
Uang muka perolehan tanah di Desa Waleo, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara	4.824.639.298	4.697.363.248
Uang muka perolehan tanah di Batam, Riau	1.100.000.000	200.000.000
Jumlah	5.924.639.298	4.897.363.248

PT Cakra Guna Dharma Eka (CDGE), entitas anak PT Mega Biru Selaras (Entitas Anak), melakukan pembayaran uang muka perolehan tanah atas 34 (tiga puluh empat) bidang tanah dengan total luas 506.660 meter persegi di Desa Waleo, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Sampai dengan tanggal laporan auditor independen, proses pengambilalihan tanah tersebut di atas masih dalam pengurusan perijinan. Jumlah uang muka perolehan tanah yang dibayar sampai dengan tanggal 30 September 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp 4.824.639.298 dan Rp 4.697.363.248.

Pada tahun 2010, PT Retzan Indonusa (RIN), Entitas Anak, melakukan pembayaran uang muka perolehan tanah untuk perolehan tanah yang terletak di Propinsi Riau, Kotamadya Daerah Kota Batam, Kecamatan Sekupang, Kelurahan Patam Lestari seluas 5.000 meter persegi. Jumlah uang muka perolehan tanah yang dibayar sampai dengan tanggal 30 September 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp 1.100.000.000 dan Rp 200.000.000

**PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 September 2011 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010 (Diaudit) dan
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2011 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan untuk
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

Akun ini terutama merupakan akumulasi pembiayaan untuk renovasi pembangunan dan pengembangan hotel dan pusat perbelanjaan yang terdiri dari:

	30 September 2011 (Tidak diaudit)	31 Desember 2010 (Diaudit)
Pembangunan hotel dan pusat perbelanjaan	203.038.613.655	131.183.652.235
Pembiayaan dan beban keuangan	24.557.102.761	14.417.358.131
Arsitektur dan design interior	108.383.054.231	12.070.370.293
Lain-lain	32.927.413.996	4.652.364.929
Jumlah	368.906.184.643	162.323.745.588

Rincian proyek pembiayaan renovasi pembangunan dan pengembangan hotel dan pusat perbelanjaan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Proyek Pembiayaan	Perkiraan Tahun Penyelesaian	Saldo 30 Sep 2011 (Tidak Diaudit)	Saldo 31 Desember 2010 (Diaudit)
Perusahaan	Hotel Harris Tuban Extention, Bali	2012	2.116.171.682	37.910.318
Entitas Anak:				
- PT Indonesian Paradise Island	Sahid Kuta Lifestyle Resort (Hotel Sheraton Bali Kuta Resort dan Lifestyle Center Beachwalk)	2012	256.980.868.669	115.716.248.863
- PT Retzan Indonusa	Hotel Harris Batam Center, Batam	2011	66.689.934.503	17.015.805.709
- PT Mega Biru Selaras dan Entitas Anak	Water Park, Bali	2011	-	15.532.498.480
- PT Dinamika Putra Perkasa dan Entitas Anak	Cikini Gold Center, Jakarta	2012	24.802.598.528	2.968.223.931
- PT Karsa Citra Unggul dan Entitas Anak	Hotel Harris Pop, Manado	2011	15.253.692.204	1.433.077.691
- PT Saranausaha Jaya	Renovasi Pasar Pramuka, Jakarta	2013	860.000.000	860.000.000
- PT Eka Ilalang Suryadinamika	Harris Hotel Sentul	2013	762.725.930	664.353.878
- PT Aneka Bina Laras dan Entitas Anak	HARRIS suites fX SUDIRMAN, Jakarta	2011	1.440.193.126	8.095.626.718
Jumlah			368.906.184.643	162.323.745.588

**PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 September 2011 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010 (Diaudit) dan
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2011 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan untuk
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. UTANG USAHA

Akun ini merupakan utang kepada pihak ketiga yang timbul antara lain untuk pembelian makanan, minuman dan perlengkapan hotel dengan rincian sebagai berikut:

	30 September 2011 (Tidak Diaudit)	31 Desember 2010 (Diaudit)
PT Surya Barutama Mandiri	-	97.306.540
UD Kartika Elektronik	98.775.000	-
PT Panca Utama, PT	57.100.000	-
PT Indo Chine	96.164.546	-
Plaza Lifestyle Prima	136.131.519	-
UD Denita Jaya	-	91.136.417
King Koil Jakarta	-	154.496.751
Umbah Laundry	-	67.681.000
Putra Mandiri	-	59.505.600
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 50 juta)	2.645.527.194	1.918.770.550
Jumlah	3.033.698.259	2.388.896.858

Rincian umur utang usaha kepada pihak ketiga berdasarkan tanggal faktur adalah sebagai berikut:

	30 September 2011 (Tidak Diaudit)	31 Desember 2010 (Diaudit)
1 - 30 hari	2.303.826.044	1.832.112.242
31- 60 hari	599.241.951	405.851.652
61- 90 hari	77.517.034	118.712.709
Lebih dari 90 hari	53.113.230	32.220.255
Jumlah	3.033.698.259	2.388.896.858

18. UTANG LAINNYA - PIHAK KETIGA

Akun ini terdiri dari:

	30 September 2011 (Tidak Diaudit)	31 Desember 2010 (Diaudit)
Utang atas renovasi pembangunan dan pengembangan Hotel dan Pusat Perbelanjaan:		
PT Cipta Indomegah Bangun Citra	-	645.000.000
PT Developing Indonesia Prakasita	-	157.399.901
PT Waskita Karya	-	11.197.240.179
Wickhams Cay Holdings Limited	-	7.318.674.000
Helios Capital	-	1.945.000.000
Lain-lain	-	660.046.538
Jumlah utang atas renovasi dan pengembangan (Dipindahkan)	-	21.923.360.618

**PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 September 2011 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010 (Diaudit) dan
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2011 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan untuk
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. UTANG LAINNYA - PIHAK KETIGA (lanjutan)

	30 September 2011 (Tidak Diaudit)	31 Desember 2010 (Diaudit)
Jumlah utang atas renovasi dan pengembangan (Pindahan)	-	21.923.360.618
Setoran jaminan tamu	927.061.729	1.027.376.319
Penyisihan atas kerugian dan kerusakan peralatan hotel dan restoran	413.067.611	389.612.396
Jasa pelayanan	574.741.055	521.518.071
Pendapatan ditangguhkan	25.206.639.736	993.181.255
Perolehan aset tetap	1.249.565.254	4.203.984.267
Lain-lain	35.725.577.692	2.250.493.388
Jumlah	64.096.653.077	31.309.526.314

19. PERPAJAKAN

a. Pajak Dibayar di Muka

Akun ini terdiri dari:

	30 September 2011 (Tidak Diaudit)	31 Desember 2010 (Diaudit)
Pajak Penghasilan Pasal 21	-	-
Pajak Penghasilan Pasal 23	13.853.692	-
Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)	2.772.622.495	321.624.000
Pajak Pertambahan Nilai	15.767.229.734	5.645.392.364
Jumlah	18.553.705.921	5.967.016.364

b. Utang Pajak

	30 September 2011 (Tidak Diaudit)	31 Desember 2010 (Diaudit)
Pajak Pembangunan I	824.557.876	815.016.829
Pajak Penghasilan		
Pasal 4 (2)	968.808.279	1.026.299.730
Pasal 21	532.982.276	154.481.023
Pasal 23	77.983.054	66.338.213
Pasal 26	31.502.489	87.487.994
Pasal 29	31.140.750	98.407
Pajak Pertambahan Nilai	-	-
Jumlah	2.466.974.724	2.149.722.196

**PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 September 2011 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010 (Diaudit) dan
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2011 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan untuk
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

- c. Rincian aset (kewajiban) pajak tangguhan pada tanggal 30 September 2011 dan 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	30 September 2011 (Tidak Diaudit)	31 Desember 2010 (Diaudit)
<u>Aset pajak tangguhan:</u>		
Perusahaan	168,305,827	173,506,461
<u>Entitas Anak yang diakuisisi:</u>		
Imbalan kerja karyawan	-	1.085.181.979
Penyusutan aset tetap	-	1.041.943.154
Jumlah	-	2.127.125.133
<u>Entitas Anak:</u>		
Imbalan kerja karyawan	1.359.146.803	137.010.284
Rugi fiskal	1.171.728.385	817.549.097
Penyusutan aset tetap	1.008.288.089	3.437.688
Penyisihan kerugian penurunan nilai	412.258	-
Biaya provisi ditangguhkan	-	(153.259.615)
Jumlah	3.539.575.535	804.737.454
Jumlah aset pajak tangguhan	3.707.881.362	3.105.369.048
<u>Liabilitas pajak tangguhan</u>		
<u>Entitas Anak:</u>		
Imbalan kerja karyawan	5.026.383	-
Biaya provisi ditangguhkan	(164.418.959)	-
Jumlah liabilitas pajak tangguhan	(159.392.576)	-

Pada bulan September 2008, Undang-undang No. 7 Tahun 1983 mengenai "Pajak Penghasilan" diubah untuk keempat kalinya dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008. Perubahan tersebut juga mencakup perubahan tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya menggunakan tarif pajak bertingkat menjadi tarif tunggal yaitu 28% untuk tahun fiskal 2009 dan 25% untuk tahun fiskal 2010 dan seterusnya.

**PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 September 2011 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010 (Diaudit) dan
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2011 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan untuk
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR

Akun ini terdiri dari:

	30 September 2011 (Tidak Diaudit)	31 Desember 2010 (Diaudit)
Listrik, air dan bahan bakar	866.022.672	311.026.622
Jasa profesional	69.398.427	4.860.415.439
Gaji, upah dan tunjangan karyawan	433.880.647	464.135.075
Lain-lain	2.187.199.774	1.029.798.255
Jumlah	3.556.501.520	6.665.375.391

21. SEWA DITERIMA DI MUKA

	30 September 2011 (Tidak Diaudit)	31 Desember 2010 (Diaudit)
Uang muka pemesanan atas persewaan ruang pada pusat perbelanjaan Cikini Gold Center, Jakarta	36.304.833.936	14.195.294.149
Uang muka persewaan unit hunian apartemen fX Residence, Jakarta	8.131.739.146	4.088.005.200
Jumlah	44.436.573.082	18.283.299.349

22. PINJAMAN JANGKA PANJANG

	30 September 2011 (Tidak Diaudit)	31 Desember 2010 (Diaudit)
Rupiah		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	114.179.815.518	24.624.000.000
PT Bank Victoria International Tbk	53.073.642.059	8.605.945.538
PT Bank Windu Kentjana International Tbk	28.783.720.000	9.000.000.000
Jumlah Pinjaman Rupiah	196.037.177.577	42.229.945.538
Dolar Amerika Serikat		
Global Emerging Markets Specialist Capital Pte Ltd (US\$ 1.704.000 pada tanggal 30 September 2011 dan US\$ 9.000.000 pada tanggal 31 Desember 2010)	15.034.392.000	80.919.000.000
Jumlah	211.071.569.577	123.148.945.538

**PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 September 2011 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010 (Diaudit) dan
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2011 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan untuk
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

22. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI)

Pada tanggal 13 Desember 2010, PT Indonesian Paradise Island (IPI), Entitas Anak, menerima fasilitas kredit investasi dengan jumlah maksimum sebesar Rp 463.838.265.098 yang ditujukan untuk pembangunan Sahid Kuta Lifestyle Resort (Hotel Sheraton Bali dan Lifestyle Center Beachwalk) di Bali. Pencairan pinjaman dilakukan secara bertahap selama proses pembangunan dilakukan. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 12 Juni 2018 termasuk masa tenggang selama 27 (dua puluh tujuh) bulan dan dikenakan bunga sebesar 12% per tahun. Pinjaman ini dijamin dengan tanah dan bangunan IPI yang terletak di Kuta, Bali dengan SHGB No. 975, 978 dan 980 (Catatan 10), saham-saham IPI, *Letter of Undertaking* dan *Letter of Guarantee* dari salah satu Komisaris IPI untuk membeli kembali aset yang dijamin, dan jaminan perusahaan dari Perusahaan. Saldo pinjaman yang telah dicairkan sampai dengan tanggal 30 September 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp 114.179.815.518 dan Rp 24.624.000.000.

PT Bank Victoria International Tbk (Bank Victoria)

Pada tanggal 5 April 2010, PT Retzan Indonusa (RIN), Entitas Anak, memperoleh fasilitas pinjaman kredit investasi dengan jumlah maksimum sebesar Rp 63 miliar dari Bank Victoria. Tingkat bunga per tahun untuk fasilitas ini sebesar 13% dan jatuh tempo dalam 78 (tujuh puluh delapan) bulan termasuk masa tenggang selama 18 (delapan belas) bulan. Fasilitas ini dijamin dengan aset tetap berupa bangunan hotel yang akan dibangun dan tanah RIN dengan SHGB No. 3896/Teluk Tering - Batam (Catatan 10), seluruh saham RIN, jaminan perusahaan atas nama Perusahaan dan PT Anugerah Nusaraya, pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Sesuai perjanjian, RIN diwajibkan memenuhi batasan-batasan tertentu yang ditetapkan antara lain memberikan informasi perkembangan usaha. Sampai dengan tanggal 30 September 2011 dan 31 Desember 2010, RIN mencatat saldo pinjaman masing-masing sebesar Rp 53.073.642.059 dan Rp 8.605.945.538, setelah memperhitungkan amortisasi biaya provisi pinjaman.

Pada tanggal 5 April 2010, PT Karsa Citra Unggul (KCU), Entitas Anak, memperoleh fasilitas Kredit Investasi dari Bank Victoria dengan jumlah maksimum pinjaman sebesar Rp 25 miliar yang akan jatuh tempo pada tanggal 5 Oktober 2016 termasuk masa tenggang selama 18 (delapan belas) bulan dan dikenakan bunga sebesar 13% per tahun. Pencairan pinjaman dilakukan secara bertahap selama proses pembangunan dilakukan. Sampai dengan tanggal 30 September 2011 dan 31 Desember 2010, KCU telah menggunakan fasilitas pinjaman tersebut sebesar Rp 344.160.000 pada tanggal 31 Desember 2010 sedangkan pada bulan Agustus 2011 telah dilunasi..

PT Bank Windu Kentjana International Tbk (Bank Windu)

Pada tanggal 2 November 2010, Perusahaan menerima fasilitas kredit *Installment Loan 1* dan 2 (Fasilitas IL-1 dan IL-2) dari Bank Windu dengan jumlah maksimum masing-masing sebesar Rp 28,2 miliar dan Rp 18 miliar yang ditujukan untuk pembangunan Hotel "Pop" Harris, Yogyakarta dan pengembangan serta renovasi HARRIS suites fX SUDIRMAN, Jakarta. Fasilitas IL-1 diberikan untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun termasuk masa tenggang selama 18 (delapan belas) bulan sedangkan Fasilitas IL-2 diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun termasuk masa tenggang selama 12 (dua belas) bulan.

Berdasarkan Akta Perubahan Pertama terhadap Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan tanggal 4 Maret 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Mellyani Noor Shandra, SH, Notaris di Jakarta, Bank Windu menyetujui penambahan fasilitas kredit berupa fasilitas kredit *Installment Loan 3* (IL-3) dengan jumlah maksimum sebesar Rp 10 miliar yang ditujukan untuk pembangunan Hotel Harris Tuban Extension, Bali. Fasilitas IL-3 diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun termasuk masa tenggang selama 12 (dua belas) bulan. Sampai dengan tanggal 30 September 2011, fasilitas kredit ini belum dicairkan,

**PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 September 2011 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010 (Diaudit) dan
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2011 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan untuk
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

PT Bank Windu Kentjana International Tbk (Bank Windu) (lanjutan)

Fasilitas kredit ini dikenakan bunga sebesar 12% per tahun dan dicairkan secara bertahap selama proses pembangunan dan pengembangan serta renovasi dilakukan serta dijamin dengan tanah dan bangunan milik Perusahaan (Catatan 10), saham Entitas Anak PT Karsa Citra Unggul yang ada dalam PT Kega Property Utama dan saham Perusahaan yang ada dalam PT Aneka Bina Laras.

Pada tanggal 30 September 2011 dan 31 Desember 2010, saldo pinjaman yang telah dicairkan adalah sebagai berikut:

	30 September 2011 (Tidak Diaudit)	31 Desember 2010 (Diaudit)
Fasilitas Kredit <i>Installment Loan I</i>	10.783.720.000	-
Fasilitas Kredit <i>Installment Loan II</i>	18.000.000.000	9.000.000.000
Jumlah	28.783.720.000	9.000.000.000

Global Emerging Markets Specialist Capital Pte Ltd

Pada tanggal 17 Desember 2010, Perusahaan menerima pinjaman dari Global Emerging Markets Specialist Capital Pte Ltd sebesar US\$ 9.000.000 yang digunakan untuk modal kerja Perusahaan. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 3% per tahun dan jatuh tempo dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pencairan pinjaman. Pada bulan Juni dan Juli 2011, Perusahaan masing-masing telah melakukan pembayaran pinjaman sebesar US\$ 6.893.000. dan US\$ 403,000

23. MODAL SAHAM

Susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perusahaan pada tanggal 30 September 2011 dan 31 Desember 2010 dari Biro Administrasi Efek PT Adimitra Transferindo adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Persentase Pemilikan	Jumlah
RBS Coutts Bank Ltd Singapore	949.000.000	39,36%	94.900.000.000
PT Grahatama Kreasibaru	946.675.350	39,27%	94.667.535.000
BSI Bank Limited	223.000.000	9,25%	22.300.000.000
Agoes Soelistyo Santoso (Direktur Utama)	10.000.000	0,41%	1.000.000.000
Patrick Santosa Rendradjaja (Direktur)	5.000.000	0,21%	500.000.000
Diana Solaiman (Direktur)	3.750.000	0,16%	375.000.000
Karel Patipeilohy (Komisaris)	1.000.000	0,04%	100.000.000
Lain-lain	272.378.250	11,30%	27.237.825.000
Jumlah	2.410.803.600	100,00%	241.080.360.000

**PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 September 2011 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010 (Diaudit) dan
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2011 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan untuk
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

23. MODAL SAHAM (lanjutan)

Susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perusahaan pada tanggal 30 September 2010 dari Biro Administrasi Efek PT Adimitra Transferindo adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Persentase Pemilikan	Jumlah
RBS Coutts Bank Ltd Singapore	949.000.000	39,36%	94.900.000.000
PT Grahatama Kreasibaru	946.675.350	39,27%	94.667.535.000
BSI Bank Limited	223.000.000	9,25%	22.300.000.000
Agoes Soelistyo Santoso (Direktur Utama)	10.000.000	0,41%	1.000.000.000
Patrick Santosa Rendradjaja (Direktur)	5.000.000	0,21%	500.000.000
Diana Solaiman (Direktur)	3.750.000	0,16%	375.000.000
Karel Patipeilohy (Komisaris)	1.000.000	0,04%	100.000.000
Lain-lain	272.378.250	11,30%	27.237.825.000
Jumlah	2.410.803.600	100,00%	241.080.360.000

24. PENDAPATAN USAHA

Akun ini terdiri dari:

	2011 (Tidak Diaudit) (Sembilan Bulan)	2010 (Tidak Diaudit) (Sembilan Bulan)
Kamar	40.111.618.178	9.392.373.124
Makanan dan minuman	9.866.478.170	2.138.041.159
Telepon	94.408.829	10.538.882
Lainnya	2.246.950.253	285.092.363
Jumlah	52.319.455.430	11.826.045.528

Tidak terdapat pendapatan sebesar 10% atau lebih kepada pihak tertentu.

**PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 September 2011 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010 (Diaudit) dan
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2011 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan untuk
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. BEBAN POKOK PENDAPATAN

Akun ini terdiri dari:

	2011 (Tidak Diaudit) (Sembilan Bulan)	2010 (Tidak Diaudit) (Sembilan Bulan)
Beban Langsung:		
Makanan dan minuman	2.941.225.517	697.588.989
Telepon	33.292.704	5.138.826
Departemen lainnya	345.624.241	31.811.892
Jumlah Beban Langsung	3.320.142.462	734.539.707
Gaji dan Beban Pegawai Lainnya	4.515.979.611	937.146.807
Beban Departemen Lainnya:		
Kamar	3.522.334.459	697.160.418
Makanan dan minuman	806.341.937	132.661.548
Departemen lainnya	280.640.902	21.254.190
Jumlah Beban Departemen Lainnya	4.609.317.298	851.076.156
Jumlah	12.445.439.371	2.522.762.670

26. BEBAN PENJUALAN

Akun ini terdiri dari:

	2011 (Tidak Diaudit) (Sembilan Bulan)	2010 (Tidak Diaudit) (Sembilan Bulan)
Promosi dan iklan	3.662.630.809	-
Gaji, upah dan tunjangan lainnya	764.602.856	133.989.975
Lain-lain	665.760.898	345.963.606
Jumlah	5.092.994.563	479.953.581

27. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	2011 (Tidak Diaudit) (Sembilan Bulan)	2010 (Tidak Diaudit) (Sembilan Bulan)
Gaji, upah dan tunjangan lainnya	7.052.432.540	891.396.412
Pemeliharaan dan listrik	4.215.928.171	175.144.767
Lain-lain	6.048.354.137	2.188.659.074
Jumlah	17.316.714.848	3.255.200.253

**PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 September 2011 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010 (Diaudit) dan
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2011 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan untuk
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. BEBAN USAHA PEMILIK

	2011 (Tidak Diaudit) (Sembilan Bulan)	2010 (Tidak Diaudit) (Sembilan Bulan)
Gaji, upah dan tunjangan lainnya	4.806.781.381	2.716.239.395
Imbalan kerja karyawan	1.013.803.804	93.833.427
Jasa profesional	1.903.181.288	1.428.667.272
Representasi dan jamuan	70.011.904	34.467.350
Lain-lain	2.854.503.124	2.667.712.330
Jumlah	10.648.281.501	6.940.919.774

29. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Perusahaan dan Entitas Anak mencatat penyisihan imbalan kerja untuk karyawannya yang telah mencapai usia pensiun yaitu 55 tahun sesuai dengan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003. Imbalan kerja tersebut tidak didanai.

Tabel berikut ini merangkum komponen-komponen atas beban penyisihan imbalan kerja yang diakui Perusahaan dan Entitas Anak di laporan laba rugi komprehensif interim konsolidasian dan penyisihan imbalan kerja yang diakui di laporan posisi keuangan interim konsolidasian berdasarkan penilaian aktuarial yang dilakukan oleh PT Dian Artha Tama, aktuaris independen, seluruhnya untuk Perusahaan dan Entitas Anak berdasarkan laporannya masing-masing pada tanggal 19 Juli 2011 dan 17 Januari 2011 untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

a. Beban penyisihan imbalan kerja

	2011 (Tidak Diaudit) (Sembilan Bulan)	2010 (Tidak Diaudit) (Sembilan Bulan)	2010 (Diaudit) (Satu Tahun)
Biaya jasa kini	874.372.157	62.377.844	1.461.202.772
Biaya bunga	168.590.645	34.018.347	302.756.447
Beban jasa lalu	161.518	-	1.545.355
Amortisasi atas keuntungan aktuarial	(29.320.516)	(2.697.362)	(18.710.216)
Amortisasi atas penyesuaian akibat perbedaan antara asumsi aktuarial dan kenyataan	-	134.598	(22.546.476)
Jumlah	1.013.803.804	93.833.427	1.724.247.882

Perhitungan beban penyisihan imbalan kerja untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010 sejumlah Rp 93.833.427 dilakukan oleh manajemen Perusahaan.

**PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 September 2011 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010 (Diaudit) dan
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2011 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan untuk
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

b. Liabilitas imbalan kerja

	30 September 2011 (Tidak Diaudit)	31 Desember 2010 (Diaudit)
Nilai kini liabilitas imbalan kerja karyawan	6.613.531.692	5.022.725.336
Keuntungan aktuarial yang belum diakui	452.827.833	1.029.830.385
Liabilitas imbalan kerja	7.066.359.525	6.052.555.721

c. Mutasi liabilitas imbalan kerja untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2011 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

	30 September 2011 (Tidak Diaudit)	31 Desember 2010 (Diaudit)
Saldo awal periode	6.052.555.721	1.115.453.662
Beban penyisihan imbalan kerja periode berjalan	1.013.803.804	1.724.247.882
Liabilitas imbalan kerja Entitas Anak yang diakuisisi	-	3.229.524.177
Pembayaran periode berjalan	-	(16.670.000)
Saldo akhir periode	7.066.359.525	6.052.555.721

Asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan kerja karyawan pada tanggal 30 September 2011 dan 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

	30 September 2011 (Tidak Diaudit)	31 Desember 2010 (Diaudit)
Tingkat diskonto	10% per tahun	8% per tahun
Tingkat kenaikan upah (gaji)	7,5% per tahun	8% per tahun
Usia pensiun	55 tahun	55 tahun
Tingkat kematian	CSO-1980	CSO-1980

**PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 September 2011 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010 (Diaudit) dan
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2011 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan untuk
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

30. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

Saldo aset dan liabilitas dalam mata uang asing serta konversinya ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs rata-rata beli dan jual uang kertas asing dan/atau kurs transaksi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia masing-masing pada tanggal laporan posisi keuangan interim konsolidasian adalah sebagai berikut:

	30 September 2011 (Tidak Diaudit)	
	Mata Uang Asing	Setara Rupiah
<u>Aset</u>		
Kas dan setara kas	US\$ 200.179 SIN\$ 2.375 RM 3	1.766.187.504 16.143.302 8.027
Jumlah Aset		1.782.338.833
<u>Liabilitas</u>		
Pinjaman jangka panjang	US\$ 1.704.000	15.034.392.000
Liabilitas - Neto		13.252.053.167
	31 Desember 2010 (Diaudit)	
	Mata Uang Asing	Setara Rupiah
<u>Aset</u>		
Kas dan setara kas	US\$ 956.878 SIN\$ 2.465 RM 3	8.603.379.823 17.209.227 8.456
Jumlah Aset		8.620.597.506
<u>Liabilitas</u>		
Pinjaman jangka panjang	US\$ 9.000.000	80.919.000.000
Liabilitas - Neto		72.298.402.494

**PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 September 2011 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010 (Diaudit) dan
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2011 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan untuk
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

31. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTIJENSI

a. Perjanjian Lisensi Merek Usaha dan Merek Dagang (*Tradenname and Trademark License Agreement*)

Pada tanggal 1 Oktober 2002, Perusahaan menandatangani perjanjian lisensi merek usaha dan merek dagang (*Tradenname and Trademark License Agreement*) dengan Harris International Hotels Corporation, British Virgin Islands, untuk penggunaan merek dagang dan logo Harris pada pengoperasian hotel milik Perusahaan yang berlokasi di Jalan Dewi Sartika, Tuban, Bali, untuk periode 15 (lima belas) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan dapat diperpanjang untuk tiap periode 5 (lima) tahun berikutnya, sehingga nama hotel menjadi Harris Hotel Tuban-Bali. Atas lisensi yang diberikan, Perusahaan akan membayar biaya lisensi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu. Beban royalti lisensi untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2011 adalah sebesar Rp 555.456.092

Pada tanggal 28 April 2004, PT Indonesian Paradise Island (IPI), Entitas Anak, menandatangani perjanjian lisensi merek usaha dan merek dagang (*Tradenname and Trademark License Agreement*) dengan Harris International Hotels Corporation, British Virgin Islands, untuk penggunaan merek dagang dan logo Harris pada pengoperasian resort milik IPI yang berlokasi di Kuta, Bali, untuk periode 5 (lima) tahun dan telah diperpanjang lagi selama 5 (lima) tahun sesuai kesepakatan bersama, sehingga nama resort menjadi Harris Resort Kuta. Atas lisensi yang diberikan, Perusahaan akan membayar biaya lisensi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu. Beban royalti lisensi untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2011 adalah sebesar Rp 1.340.808.735

Pada tanggal 20 Mei 2010, PT Padma Suasa (PS), entitas anak PT Aneka Bina Laras (Entitas Anak) menandatangani perjanjian merek dagang dan lisensi (*Tradenname and Trademark License Agreement*) dengan Harris International Hotels Corporation, British Virgin Islands, untuk penggunaan merek dagang dan logo HARRIS pada pengoperasian hotel yang berlokasi di Jalan Jendral Sudirman, Jakarta selama 15 (lima belas) sejak tanggal peresmian hotel dan dapat diperpanjang untuk tiap periode 5 (lima) tahun berikutnya, sehingga nama hotel yang digunakan adalah HARRIS suites fX SUDIRMAN, Jakarta. Atas lisensi yang diberikan, Perusahaan akan membayar biaya lisensi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu. Beban royalti lisensi untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2011 adalah sebesar Rp 297.994.102

b. Perjanjian Konsultan Manajemen (*Management Consulting Agreement*)

Pada tanggal 1 Oktober 2002, Perusahaan telah menandatangani perjanjian konsultan manajemen (*Management Consulting Agreement*) dengan PT Tauzia International Management (Tauzia) berupa penunjukkan Tauzia selaku konsultan tunggal dan khusus untuk pemberian jasa konsultan manajemen pada Perusahaan dalam pengoperasian Hotel Harris Tuban-Bali. Jasa konsultan manajemen hotel meliputi wewenang perekrutan, reservasi dan promosi, program pra-pembukaan dan jasa lainnya. Perusahaan akan membayar jasa konsultan manajemen yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari laba usaha (*Gross Operating Profit*). Perjanjian ini akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan dapat diperpanjang 5 (lima) tahun berikutnya dengan kesepakatan masing-masing pihak. Beban jasa konsultan manajemen untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2011 adalah sebesar Rp 203.083.085.

**PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 September 2011 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010 (Diaudit) dan
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2011 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan untuk
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

31. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTIJENSI (lanjutan)

b. Perjanjian Konsultan Manajemen (*Management Consulting Agreement* (lanjutan))

Pada tanggal 28 April 2004, PT Indonesian Paradise Island (IPI), Entitas Anak, telah menandatangani perjanjian konsultan manajemen (*Management Consulting Agreement*) dengan PT Tauzia International Management (Tauzia) berupa penunjukkan Tauzia selaku konsultan tunggal dan khusus untuk pemberian jasa konsultan manajemen pada IPI dalam pengoperasian Harris Resort Kuta. Jasa konsultan manajemen hotel meliputi wewenang perekrutan, reservasi dan promosi, program pra-pembukaan dan jasa lainnya. IPI akan membayar jasa konsultan manajemen yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari laba usaha (*Gross Operating Profit*). Perjanjian berlaku dari tanggal 28 April 2004 sampai dengan 31 Desember 2009 dan telah diperpanjang lagi selama 5 (lima) tahun atas kesepakatan bersama. Beban jasa konsultan manajemen untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2011 adalah sebesar Rp 662.319.030.

PT Padma Suasa (PS), entitas anak PT Aneka Bina Laras (Entitas Anak), telah menandatangani hak atas perjanjian konsultan manajemen (*Management Consulting Agreement*) dengan PT Tauzia International Management (Tauzia) berupa penunjukkan Tauzia selaku konsultan tunggal dan khusus untuk pemberian jasa konsultan manajemen pada PS dalam pengoperasian HARRIS suites fX SUDIRMAN, Jakarta selama 15 (lima belas) tahun sejak tanggal peresmian hotel dan dapat diperpanjang untuk periode 5 (lima) tahun berikutnya. Jasa konsultan manajemen hotel meliputi wewenang perekrutan, reservasi dan promosi, program pra-pembukaan dan jasa lainnya. PS akan membayar jasa konsultan manajemen yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari laba usaha (*Gross Operating Profit*). Beban jasa konsultan manajemen untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2011 adalah sebesar Rp 533.518.082

c. Perjanjian Sewa Jangka Panjang

Apartemen fX Residence:

Pada tanggal 16 Februari 2010, PT Aneka Bina Laras (ABL), Entitas Anak, menandatangani perjanjian Pemindahan Hak Untuk Menghuni (Perjanjian Sewa) dengan PT Aneka Bina Lestari atas hak untuk menghuni 14 (empat belas) unit apartemen fX Residence yang berlokasi di Jalan Pintu Satu Senayan, Jakarta untuk periode 33 (tiga puluh tiga) tahun yang akan berakhir pada tanggal 11 Juni 2043. Jumlah pembayaran atas hak untuk menghuni ini sebesar Rp 40.810.000.000 (lihat Catatan 11). Atas perjanjian ini, ABL harus memenuhi ketentuan dan tata tertib yang tercantum dalam perjanjian ini. Atas perolehan hak untuk menghuni atas obyek hunian ini, ABL memiliki hak untuk mengalihkan atau memindahkan obyek hunian dengan kepada pihak ketiga sesuai dengan peruntukan awal yang disepakati.

Tanah - AM Sangaji, Yogyakarta:

Pada tanggal 9 September 2008, PT Kega Property Utama (KPU), entitas anak PT Karsa Citra Unggul (Entitas Anak), mengadakan perjanjian kerjasama dengan Induk Koperasi TNI Angkatan Udara (Inkopau-Pukadara) berdasarkan perjanjian kerjasama No. Sperjan/20/IX.2008/Inkopau berupa pemanfaatan aset tanah TNI AU eks Mess Jetis seluas 3.094 meter persegi yang terletak di Jalan AM Sangaji No. 10, Yogyakarta, untuk pembangunan hotel serta sarana pendukungnya oleh KPU. Kerjasama berlangsung sampai jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun sejak tanggal 9 September 2008 sampai dengan 8 September 2038. Nilai hak pemanfaatan tanah tersebut adalah sebesar Rp 816.816.000 (lihat Catatan 11) yang dibayarkan pada saat penandatanganan perjanjian.

**PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 September 2011 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010 (Diaudit) dan
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2011 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan untuk
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

31. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTIJENSI (lanjutan)

c. Perjanjian Sewa Jangka Panjang (lanjutan)

Tanah di Ubud, Bali:

PT Langgeng Cipta Karya (LCK), Entitas Anak, mengadakan perikatan sewa menyewa tanah sesuai:

(i) Akta No. 23

Berdasarkan perikatan sewa menyewa tanah antara LCK dan I Wayan Budal yang dinyatakan dalam akta No. 23 tanggal 8 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Ni Wayan Widastri, SH, Notaris di Denpasar, LCK menyewa sebidang tanah seluas 2.000 meter persegi yang merupakan sebagian dari Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1493/Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Bali, dengan jangka waktu sewa selama 20 (dua puluh) tahun sampai dengan tanggal 1 September 2035. Jumlah pembayaran atas hak sewa ini sebesar Rp 300.000.000. Atas perikatan ini, kedua belah pihak wajib memenuhi ketentuan seperti yang tercantum dalam akta perjanjian, antara lain pemberian ijin kepada LCK untuk mendirikan bangunan di atas tanah yang di sewa (lihat Catatan 11).

(ii) Akta No. 27

Berdasarkan perikatan sewa menyewa tanah antara LCK dan I Made Jedog yang dinyatakan dalam akta No. 27 tanggal 11 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Ni Wayan Widastri, SH, Notaris di Denpasar, LCK menyewa 2 (dua) bidang tanah seluas 2.885 meter persegi sesuai SHM No. 1960/Kedewatan dan seluas 115 meter persegi yang merupakan sebagian dari sebidang tanah seluas 395 meter persegi sesuai SHM No. 1957/Kedewatan yang terletak di Kecamatan Ubud, Bali, dengan jangka waktu sewa selama 20 (dua puluh) tahun sampai dengan tanggal 10 Agustus 2014. Jumlah pembayaran atas hak sewa ini adalah sebesar Rp 287.200.000. Atas perikatan ini, kedua belah pihak wajib memenuhi ketentuan seperti yang tercantum dalam akta perjanjian, antara lain pemberian ijin kepada LCK untuk mendirikan bangunan di atas tanah yang di sewa (lihat Catatan 11).

d. Perjanjian Pembangunan Sahid Kuta Lifestyle Resort

Berdasarkan Surat Perintah Kerja No. 010.VI/10/IPI-DEV/SPK-SA tanggal 18 Juni 2010, PT Indonesian Paradise Island, Entitas Anak, menunjuk PT Waskita Karya sebagai kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan struktur dan arsitektur pada proyek pembangunan Sahid Kuta Lifestyle Resort, untuk Hotel Sheraton Bali Kuta Resort dan Lifestyle Center Beachwalk, di Bali dengan nilai kontrak sebesar Rp 261.218.000.000. Seluruh pekerjaan sudah harus diselesaikan dan diserahkan oleh kontraktor dalam waktu 20 (dua puluh) bulan terhitung sejak tanggal 1 Juni 2010 yaitu tanggal 1 Maret 2012 (lihat Catatan 16).

32. INFORMASI SEGMENT USAHA

Berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh manajemen dalam mengevaluasi kinerja segmen dan menentukan alokasi sumber daya yang dimiliki, Perusahaan dan Entitas Anak menggunakan segmen usaha sebagai segmen primer yang terdiri dari usaha perhotelan, pusat perbelanjaan dan perdagangan umum. Sampai dengan tanggal 30 September 2011, segmen usaha pusat perbelanjaan dan perdagangan umum masih dalam tahap pengembangan.

**PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 September 2011 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010 (Diaudit) dan
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2011 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan untuk
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

32. INFORMASI SEGMENT USAHA (lanjutan)

Informasi menurut segmen usaha adalah sebagai berikut:

	30 September 2011 (Tidak Diaudit)			
	Perhotelan	Pusat Perbelanjaan	Perdagangan Umum	Jumlah
Pendapatan usaha	52.319.455.430	-	-	52.319.455.430
Hasil segmen (laba kotor)	39.874.016.059			39.874.016.059
Beban penjualan	(3.286.423.182)	-	(1.806.571.381)	(5.092.994.563)
Beban umum dan administrasi	(14.321.894.952)	(486.780.767)	(2.508.039.129)	(17.316.714.848)
Beban usaha pemilik	(10.648.281.501)	-	-	(10.648.281.501)
Beban penyusutan	(5.702.923.835)	(18.216.765)	(103.292.623)	(5.824.433.223)
Jasa manajemen dan lisensi	(3.593.179.126)	-	-	(3.593.179.126)
Beban operasi lainnya	(1.286.311.840)	-	-	(1.286.311.840)
Pendapatan operasi lainnya	2.453.265.984	4.106.793	99.838.355	2.557.211.132
Laba (rugi) usaha	3.488.267.607	(500.890.739)	(4.318.064.778)	(1.330.687.910)
Bagian atas laba neto Entitas Asosiasi	1.932.646.039	-	-	1.932.646.039
Pendapatan keuangan	1.125.100.527	4.433.482	464.208.549	1.593.742.558
Biaya keuangan	(2.152.318.686)	(1.571.696)	(94.787.053)	(2.248.677.435)
Laba (rugi) sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan	4.393.695.487	(498.028.953)	(3.948.643.282)	(52.976.748)
Manfaat (beban) pajak penghasilan	418.731.364	-	(6.752.375)	411.978.989
Laba (rugi) bersih	4.812.426.851	(498.028.953)	(3.955.395.657)	359.002.241
Aset segmen	926.287.090.393	4.591.815.363	46.390.279.275	977.269.185.030
Liabilitas segmen	298.458.338.630	692.000.900	42.375.281.592	341.525.621.122
Perolehan aset tetap	46.915.539.796	-	86.823.900	47.002.363.696
	30 September 2010 (Tidak Diaudit)			
	Perhotelan	Pusat Perbelanjaan	Perdagangan Umum	Jumlah
Pendapatan usaha	11.826.045.528	-	-	11.826.045.528
Hasil segmen (laba kotor)	9.303.282.858			9.303.282.858
Beban penjualan	(479.953.581)	-	-	(479.953.581)
Beban umum dan administrasi	(3.255.200.253)	-	-	(3.255.200.253)
Beban usaha pemilik	(5.768.273.731)	(369.702.237)	(802.943.806)	(6.940.919.774)
Beban penyusutan	(1.380.315.787)	(4.021.625)	(8.174.933)	(1.392.512.345)
Jasa manajemen dan lisensi	(491.866.154)	-	-	(491.866.154)
Beban operasi lainnya	(49.980.509)	3.046.645	(96.457.813)	(143.391.677)
Pendapatan operasi lainnya	4.818.179.860	(385.503)	24.993.587	4.842.787.943
Laba usaha	2.695.872.703	(371.062.720)	(882.582.966)	1.442.227.017

**PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 September 2011 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010 (Diaudit) dan
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2011 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan untuk
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

32. INFORMASI SEGMENT USAHA (lanjutan)

30 September 2010 (Tidak Direvisi) (lanjutan)

	Perhotelan	Pusat Perbelanjaan	Perdagangan Umum	Jumlah
Bagian atas laba neto				
Entitas Asosiasi	3.052.173.286	-	-	3.052.173.286
Pendapatan keuangan	115.925.496	1.411.524	8.538.704	125.875.724
Biaya keuangan	-	-	-	-
Laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan	5.863.971.486	(369.651.197)	(874.044.262)	4.620.276.027
Beban pajak penghasilan tangguhan	14.196.126	-	-	14.196.126
Laba (rugi) bersih	5.878.167.612	(369.651.197)	(874.044.262)	4.634.472.153
Aset segmen	508.293.962.776	5.244.780.833	11.331.216.967	524.869.960.576
Liabilitas segmen	5.494.951.220	647.329.739	2.071.042.382	8.213.323.341
Perolehan aset tetap	23.735.170.523	-	-	23.735.170.523

33. KUASI REORGANISASI

Perusahaan didirikan pada tahun 1996, selanjutnya mulai melakukan kegiatan operasi komersial pada bulan Oktober 2002. Kegiatan operasi Perusahaan mencakup bidang perhotelan. Kegiatan usaha Perusahaan mengalami kerugian operasi dan usaha sejak tahun 1996 sampai 2008, selanjutnya sejak tahun 2009, Perusahaan telah mengalami laba usaha. Akumulasi kerugian terjadi karena pendapatan pada tahun-tahun awal operasi tidak mampu menutup beban penyusutan dan beban operasional lainnya. Keadaan ini mengakibatkan Perusahaan mengalami akumulasi saldo defisit sebesar Rp 31.224.820.582 pada laporan posisi keuangan tanggal 31 Juli 2009.

Untuk memperoleh awal yang baik (*fresh start*) dengan laporan posisi keuangan yang menunjukkan nilai sekarang dan tidak dibebani oleh defisit, maka Perusahaan melaksanakan Kuasi-Reorganisasi per 31 Juli 2009 (Catatan 2x). Kuasi-Reorganisasi dilakukan Perusahaan sebagai langkah penting untuk dapat meneruskan usaha secara lebih baik.

Sehubungan dengan rencana Kuasi-Reorganisasi Perusahaan efektif pada tanggal 31 Juli 2009, Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan yang dilakukan pada tanggal 29 Januari 2010 memutuskan pelaksanaan Kuasi-Reorganisasi Perusahaan yang berlaku surut pada tanggal 31 Juli 2009 guna menutup saldo defisit sebesar Rp 31.224.820.582 dengan pengeliminasian sebagai berikut:

- a. Penjumlahan (*set off*) antara Surplus Revaluasi Aset Tetap sebesar Rp 75.685.960 dengan Saldo Defisit.
- b. Penjumlahan (*set off*) antara Selisih Penilaian Kembali Investasi pada Entitas Asosiasi sebesar Rp 31.149.134.622 dengan Saldo Defisit.

**PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 September 2011 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010 (Diaudit) dan
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2011 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan untuk
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

33. KUASI REORGANISASI (lanjutan)

Sehubungan dengan pelaksanaan Kuasi-Reorganisasi pada tahun 2009, Perusahaan membukukan selisih penilaian aset dan liabilitas setelah eliminasi saldo defisit sebesar Rp 144.715.511.834 adalah sebagai berikut:

- Surplus revaluasi aset tetap	:	75.685.960
- Selisih penilaian kembali investasi pada Entitas Asosiasi	:	186.457.497.140
- Eliminasi selisih transaksi perubahan ekuitas Entitas Asosiasi	:	(10.592.850.684)
Selisih penilaian aset dan liabilitas sebelum eliminasi saldo defisit	:	175.940.332.416
Eliminasi saldo defisit	:	(31.224.820.582)
Selisih penilaian aset dan liabilitas setelah eliminasi saldo defisit	:	144.715.511.834

34. NILAI WAJAR DARI INSTRUMEN KEUANGAN

Nilai wajar atas aset dan liabilitas keuangan adalah nilai dimana instrumen dapat dipertukarkan/diselesaikan antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi secara wajar (*arm's length transaction*), yang bukan berasal dari penjualan yang dipaksakan atau likuidasi.

Berikut ini adalah metode dan asumsi yang digunakan untuk memperkirakan nilai wajar setiap kelompok dari instrumen keuangan Perusahaan dan Entitas Anak:

1. Kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lainnya, utang usaha, utang lainnya dan biaya masih harus dibayar mendekati nilai tercatatnya karena bersifat jangka pendek.
2. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai wajar mengacu pada harga kuotasi yang dipublikasikan pada pasar aktif.
3. Nilai tercatat dari utang bank mendekati nilai wajarnya disebabkan oleh pemakaian suku bunga mengambang atas instrumen tersebut, dimana tingkat bunga tersebut selalu disesuaikan dengan pasar oleh masing-masing bank.
4. Nilai wajar utang sewa pembiayaan diperkirakan dengan mendiskontokan arus kas masa depan menggunakan tingkat suku bunga saat ini bagi pinjaman, yang mempersyaratkan risiko kredit dan sisa masa jatuh tempo yang serupa.

**PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 September 2011 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010 (Diaudit) dan
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2011 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan untuk
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

34. NILAI WAJAR DARI INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

Tabel berikut menyajikan nilai wajar, yang mendekati nilai tercatat, atas aset keuangan dan liabilitas keuangan Perusahaan dan Entitas Anak:

	30 September 2011	31 Desember 2010
	(Tidak Diaudit)	(Diaudit)
Aset keuangan lancar		
<i>Aset keuangan yang dicatat sebesar nilai wajar</i>		
Investasi jangka pendek	33.378.847.208	56.434.204.983
<i>Pinjaman yang diberikan dan piutang</i>		
Kas dan setara kas	39.618.849.932	95.113.356.789
Piutang usaha	4.696.830.511	2.880.788.386
Piutang lainnya	2.749.184.372	1.382.715.297
Jumlah aset keuangan lancar	<u>80.443.712.023</u>	<u>155.811.065.455</u>
Aset keuangan tidak lancar		
<i>Pinjaman yang diberikan dan piutang</i>		
Jaminan	2.455.487.225	109.079.032
Jumlah aset keuangan	<u>82.899.199.248</u>	<u>155.920.144.487</u>
Liabilitas keuangan jangka pendek		
<i>Liabilitas yang dicatat sebesar nilai wajar atau biaya perolehan yang diamortisasi</i>		
Utang usaha	3.033.698.259	2.388.896.858
Utang lainnya	68.196.070.549	46.832.366.286
Biaya masih harus dibayar	3.556.501.520	6.665.375.391
Utang sewa pembiayaan jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	366.100.430	266.750.013
Jumlah liabilitas keuangan jangka pendek	<u>75.152.370.758</u>	<u>56.153.388.548</u>
Liabilitas keuangan jangka panjang		
<i>Liabilitas yang dicatat sebesar nilai wajar atau biaya perolehan yang diamortisasi</i>		
Utang bank jangka panjang	211.071.569.577	123.148.945.538
Utang sewa pembiayaan jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	1.172.380.881	627.539.438
Jumlah liabilitas keuangan jangka panjang	<u>212.243.950.458</u>	<u>123.776.484.976</u>
Jumlahliabilitas keuangan	<u>287.396.321.216</u>	<u>179.929.873.524</u>

**PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 September 2011 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010 (Diaudit) dan
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2011 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan untuk
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

35. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Liabilitas keuangan utama Perusahaan dan Entitas Anak meliputi utang jangka pendek dan jangka panjang, utang usaha dan lainnya, utang sewa pembiayaan, dan biaya masih harus dibayar. Tujuan utama dari liabilitas keuangan ini adalah untuk mengumpulkan dana untuk operasi Perusahaan dan Entitas Anak. Perusahaan dan Entitas Anak juga mempunyai berbagai aset keuangan seperti kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lainnya dan aset lancar lainnya yang dihasilkan langsung dari kegiatan usahanya.

Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Perusahaan dan Entitas Anak adalah risiko suku bunga atas nilai wajar dan arus kas, risiko mata uang, risiko kredit dan risiko likuiditas. Kepentingan untuk mengelola risiko ini telah meningkat secara signifikan dengan mempertimbangkan perubahan dan volatilitas pasar keuangan baik di Indonesia maupun internasional. Direksi Perusahaan dan Entitas Anak menelaah dan menyetujui kebijakan untuk mengelola risiko-risiko yang dirangkum di bawah ini.

a. Risiko suku bunga atas nilai wajar dan arus kas

Risiko suku bunga atas nilai wajar dan arus kas adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Perusahaan dan Entitas Anak terhadap risiko perubahan suku bunga pasar terutama terkait dengan utang bank jangka panjangnya. Fluktuasi suku bunga mempengaruhi biaya atas pinjaman baru dan bunga atas saldo utang Perusahaan dan Entitas Anak yang dikenakan suku bunga mengambang.

Pada tanggal 30 Juni 2011, utang bank jangka panjang Perusahaan dan Entitas Anak dikenakan suku bunga mengambang.

Kebijakan Perusahaan dan Entitas Anak terkait dengan risiko suku bunga adalah dengan mengelola biaya bunga melalui kombinasi pinjaman dengan suku bunga tetap dan variabel. Perusahaan dan Entitas Anak mengevaluasi perbandingan suku bunga tetap terhadap suku bunga mengambang dari utang bank jangka pendek dan utang jangka panjang lainnya sejalan dengan perubahan suku bunga yang relevan di pasar uang. Berdasarkan penilaian manajemen, pembiayaan baru akan ditentukan pada suku bunga tetap atau mengambang.

Saat ini, Perusahaan dan Entitas Anak tidak mempunyai kebijakan lindung nilai formal atas risiko suku bunga. Untuk utang sewa pembiayaan dan utang bank jangka panjang, Perusahaan dan Entitas Anak mengelola risiko suku bunga dengan mengalihkannya kepada para pelanggan.

b. Risiko mata uang

Risiko mata uang adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Dampak fluktuasi nilai tukar terhadap Perusahaan dan Entitas Anak terutama berasal dari utang jangka panjang dan kas dan setara kas dalam mata uang asing.

Aset dan liabilitas moneter Perusahaan dan Entitas Anak dalam mata uang asing pada tanggal 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 disajikan pada Catatan 30.

Perusahaan dan Entitas Anak tidak mempunyai kebijakan lindung nilai yang formal untuk risiko pertukaran mata uang asing. Walaupun demikian, terkait dengan hal-hal yang telah didiskusikan pada paragraf di atas, fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap menghasilkan lindung nilai natural terhadap risiko mata uang Perusahaan dan Entitas Anak.

**PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 September 2011 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010 (Diaudit) dan
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2011 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan untuk
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

35. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

c. Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana salah satu pihak terhadap suatu instrumen keuangan gagal memenuhi liabilitasnya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan. Risiko kredit yang dihadapi Perusahaan dan Entitas Anak berasal dari kredit yang diberikan kepada pelanggan. Perusahaan melakukan hubungan usaha hanya dengan pihak ketiga yang diakui dan kredibel. Perusahaan dan Entitas Anak memiliki kebijakan untuk semua pelanggan yang akan melakukan perdagangan secara kredit harus melalui prosedur verifikasi kredit.

Sebagai tambahan, saldo piutang dipantau secara terus menerus untuk mengurangi risiko piutang yang tidak tertagih. Nilai maksimal eksposur terhadap risiko kredit adalah sebesar nilai tercatat piutang sebagaimana diungkapkan pada Catatan 6. Tidak ada risiko kredit yang terpusat.

Sehubungan dengan risiko kredit yang timbul dari aset keuangan lainnya yang mencakup kas dan setara kas, investasi jangka pendek dalam bentuk efek dan investasi pengelolaan dana melalui manajer investasi tertentu, risiko kredit yang dihadapi timbul karena wanprestasi dari pihak terkait. Perusahaan dan Entitas Anak memiliki kebijakan untuk tidak menempatkan investasi pada instrumen yang memiliki risiko kredit tinggi dan hanya menempatkan investasinya pada bank-bank dengan peringkat kredit yang tinggi dan manajer investasi dengan reputasi yang baik. Nilai maksimal eksposur terhadap risiko ini adalah sebesar nilai tercatat dari aset keuangan sebagaimana diungkapkan pada Catatan 4 dan 5.

d. Risiko likuiditas

Dalam mengelola risiko likuiditas, Perusahaan dan Entitas Anak memantau dan menjaga tingkat kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasi Perusahaan dan Entitas Anak dan untuk mengatasi dampak dari fluktuasi arus kas. Perusahaan dan Entitas Anak juga secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo utang jangka panjang mereka, dan terus menelaah kondisi pasar keuangan untuk memelihara fleksibilitas pendanaan dengan cara menjaga ketersediaan komitmen fasilitas kredit.

36. REKLASIFIKASI AKUN

Beberapa akun dalam laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2010 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 30 September 2011, sebagai berikut:

	Setelah Reklasifikasi	Sebelum Reklasifikasi
Piutang pihak hubungan istimewa	-	957.466.816
Piutang lainnya - pihak-pihak berelasi	957.466.816	-
Utang pihak hubungan istimewa	-	15.522.839.972
Utang lainnya - pihak-pihak berelasi	15.522.839.972	-

Reklasifikasi di atas tidak mempengaruhi laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dan laporan perubahan ekuitas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

**PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 September 2011 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010 (Diaudit) dan
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2011 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan untuk
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

37. STANDAR AKUNTANSI BARU

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan interim konsolidasian, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) serta mencabut beberapa PSAK tertentu. Standar-standar akuntansi keuangan tersebut akan berlaku efektif sebagai berikut:

Efektif yang berlaku pada tanggal 1 Januari 2012:

- PSAK 10 (Revisi 2010) : Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing.
- PSAK 18 (Revisi 2010) : Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya.
- PSAK 24 (Revisi 2010) : Imbalan Kerja.
- PSAK 34 (Revisi 2010) : Kontrak Konstruksi.
- PSAK 46 (Revisi 2010) : Pajak Penghasilan.
- PSAK 50 (Revisi 2010) : Instrumen Keuangan: Penyajian.
- PSAK 53 (Revisi 2010) : Pembayaran Berbasis Saham.
- PSAK 60 : Instrumen Keuangan: Pengungkapan.
- PSAK 61 : Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah.
- ISAK 13 : Lindung Nilai Investasi Neto dalam Kegiatan Usaha Luar Negeri.
- ISAK 15: PSAK No. 24 - Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum dan Interaksinya.
- ISAK 18 : Bantuan Pemerintah - Tidak Berelasi Spesifik Dengan Aktivitas Operasi.
- ISAK 20 : Pajak Penghasilan - Perubahan Dalam Status Pajak Entitas atau Para Pemegang Saham.

Perusahaan dan Entitas Anak sedang mengevaluasi dampak dari revisi Standar Akuntansi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan konsolidasiannya.

38. TANGGUNG JAWAB ATAS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN

Manajemen Perusahaan dan Entitas Anak bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan interim konsolidasian ini yang diselesaikan dan disetujui pada tanggal 28 Oktober 2011.

**PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 September 2011 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2010 (Diaudit) dan
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2011 (Tidak Diaudit)
Dengan Angka Perbandingan untuk
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2010 (Tidak Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**
